



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 31 TAHUN 2005**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 – 2010**

BUPATI JEMBRANA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Peraturan Bupati Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010,

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 – 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010 yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Kabupaten Jembrana adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana untuk Periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2006 sampai dengan 2010,
2. Rencana Pembangunan

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010 merupakan Perencanaan Strategis Kabupaten Jembrana adalah Dokumen Perencanaan Strategis Kabupaten Jembrana Periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2006 sampai dengan 2010,
3. Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Perencanaan Strategis dalam periode 5 (lima) Tahunan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 - 2010,
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2005,
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025,
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010 sebagaimana pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana setiap tahunnya.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010 dimaksud pasal 2 ayat (1) menjadi :

- a. Perencanaan Strategik Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010,
- b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Perencanaan Strategik,
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
- d. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyusun Arah Kebijakan Umum (AKU) / Kebijakan Umum (KU) APBD.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010 yang dituangkan dalam Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2006 – 2010,
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam meletakkan program prioritas pembangunan.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 6

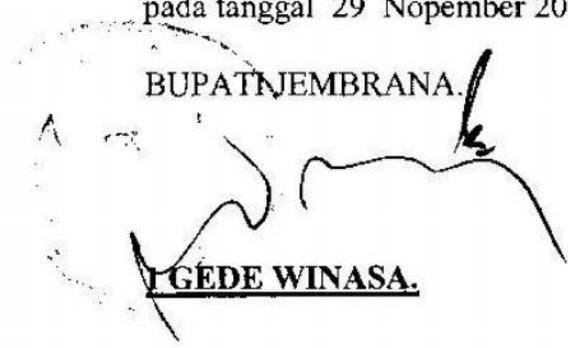
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 29 Nopember 2005

BUPATIJEMBRANA.


IGDE WINASA.

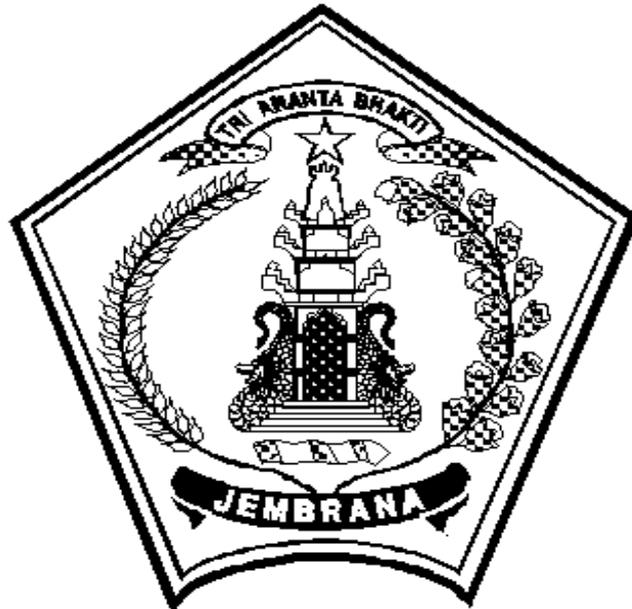
Diundangkan di Negara
pada tanggal 29 Nopember 2005

PERATURAN BUPATI DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.



(BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2005 NOMOR 32)

**EVALUASI DAN KAJIAN TERHADAP RPJMD
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006-2010**
Perspektif Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli



**KERJASAMA ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KABUPATEN JEMBRANA
DENGAN
LEMBAGA PENGAJIAN PEMBERDAYAAN
PEMBANGUNAN BALI (LP3B)
2008**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama izinkan memanjatkan *angayu bagya* terhadap *Ida Hyang Widi Wasa* karena atas karunia dan bimbingan-Nya evaluasi dan kajian terhadap PRJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Tujuan dari evaluasi dan kajian ini ingin melihat ketaatasasan atau konsistensi dan keberlanjutan antara RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dengan RKPd Kabupaten Jembrana tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008. Disamping itu ingin menyajikan pokok-pokok pikiran yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan atau acuan dalam menyusun RKPd Kabupaten Jembrana tahun 2009 dan tahun 2010.

Selanjutnya, evaluasi dan kajian ini hanya menekankan pada 3 (tiga) aspek yakni : pendidikan, kesehatan dan daya beli. Pendekatan yang di pergunakan dalam evaluasi dan kajian ini adalah bersifat deskriptif komparatif dengan mengkaji dokumen-dokumen yang telah ada.

Hasil evaluasi dan kajian ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Mudah-mudahan hasil evaluasi dan kajian ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana di masa yang akan datang.

Jembrana, April 2008

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Tujuan Evaluasi dan Kajian	4
1.4. Manfaat Melakukan Evaluasi dan kajian	4
BAB II EVALUASI RPJMD TH 2006-2010 ATAS DASAR RKPD TAHUN 2006	6
2.1. Prolog	6
2.2. Evaluasi Bidang Pendidikan	7
2.3. Evaluasi Bidang Kesehatan	18
2.4. Evaluasi Bidang Daya Beli	29
2.5. Epilog	43
BAB III EVALUASI RPJMD TH 2006-2010 ATAS DASAR RKPD TAHUN 2007	45
3.1. Prolog	45
3.2. Evaluasi Bidang Pendidikan	46
3.3. Evaluasi Bidang Kesehatan	58
3.4. Evaluasi Bidang Daya Beli	66
3.5. Epilog	83
BAB IV EVALUASI RPJMD TH 2006-2010 ATAS DASAR RKPD TAHUN 2008	84
4.1. Prolog	84
4.2. Evaluasi Bidang Pendidikan	85
4.3. Evaluasi Bidang Kesehatan	95
4.4. Evaluasi Bidang Daya Beli	106
4.5. Epilog	123
BAB V POKOK-POKOK PIKIRAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2009	125
5.1. Prolog	125
5.2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	126
5.3. Peningkatan Kualitas Kesehatan	136
5.4. Peningkatan Daya Beli Masyarakat.....	143
5.5. Epilog	152
BAB VI POKOK-POKOK PIKIRAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2010	154
6.1. Prolog	154
6.2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	155

6.3. Peningkatan Kualitas Kesehatan	167
6.4 Peningkatan Daya Beli Masyarakat.....	175
6.5. Epilog	186
BAB VII PENUTUP	187
7.1. Kesimpulan	187
7.2. Rekomendasi	189

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan pada suatu daerah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan aturan hukum atau regulasi. Begitu pula dengan pembuatan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disingkat dengan RPJMD selalu berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disingkat RPJPD, RPJPN dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Di Kabupaten Jemberana penyusunan RPJMD periode 2006-2010, juga tidak terpisahkan dengan tata cara dan prosedur tetap (protap) seperti tersebut di atas, sehingga seluruh kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD telah memiliki referensi dan kejelasan landasan hukum. Apalagi dalam penjelasan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 telah disebutkan bahwa RPJMD dinyatakan sebagai perencanaan strategik daerah.

RPJMD Kabupaten Jemberana tahun 2006-2010 sebagai perencanaan strategik daerah, tentu harus benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi pedoman, dasar dan pijakan dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD pada setiap tahun. Oleh karena untuk mengukur apakah RPJMD Kabupaten Jemberana tahun 2006-2010 bermanfaat secara optimal atau kurang optimal kepada masyarakat

dapat dilihat dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahunan.

Bila dilihat dari aspek waktu, maka RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah diperasionalkan dalam 3 (tiga) tahun, yakni tahun 2006 dalam bentuk RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, tahun 2007 dalam bentuk RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 serta tahun 2008 dalam bentuk RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 dan untuk RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 kini sedang dalam proses berjalan.

Selanjutnya dalam rangka melihat apakah RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 tersebut telah berjalan secara optimal sebagaimana diharapkan, dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap RPJMD yang telah dan sedang berjalan, sementara itu untuk tahun 2009 dan tahun 2010 yang belum dituangkan dalam bentuk RKPD tahunan perlu pula dilakukan pengkajian lebih awal sehingga dalam pelaksanaan lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Jembrana.

Isu pembangunan yang sangat dominan dan populer di Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu 10 tahun terakhir adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, peningkatan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya beli masyarakat. Sehubungan dengan 3 (tiga) besar isu pembangunan tersebut, maka fokus evaluasi dan kajian terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 Kabupaten Jembrana ini

ditekankan pada 3 (tiga) perspektif tersebut, yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli.

1.2. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, bahwa RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah dioperasionalkan selama 3 (tiga) tahun dalam bentuk RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 serta RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009-2010 belum tersusun, maka dapat diajukan permasalahan seperti berikut ini.

1. Apakah RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 ?
2. Apakah RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 ?
3. Apakah RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 ?
4. Bagimanakah sebaiknya menjabarkan RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 menjadi RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009 ?
5. Bagimanakah sebaiknya menjabarkan RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 menjadi RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2010 ?

1.3. Tujuan Evaluasi dan Kajian

Sebagaimana identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya dapat dirumuskan tujuan evaluasi dan kajian terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 seperti berikut ini.

1. Untuk mengetahui RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006.
2. Untuk mengetahui RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007.
3. Untuk mengetahui RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008.
4. Untuk mengetahui penjabaran RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 menjadi RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009.
5. Untuk mengetahui penjabaran RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 menjadi RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2010.

1.4. Manfaat Melakukan Evaluasi dan Kajian.

Sinkronisasi antara RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dengan RKPD tahunan diduga akan dapat memberikan manfaat secara optimal, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan evaluasi dan kajian terhadap RPJMD ini, adapun manfaat yang dapat dirumuskan adalah seperti berikut ini.

1. Bagi Pemerintah. Hasil evaluasi dan kajian terhadap RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010 diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, terutama dalam mengambil keputusan atau kebijakan pembangunan.
2. Bagi Masyarakat. Hasil evaluasi dan kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Jember yang sehat, sejahtera dan berkeadilan.

BAB II

EVALUASI RPJMD TAHUN 2006-2010 ATAS DASAR RKPD TAHUN 2006

2.1. Prolog.

Pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan dan bertujuan untuk mencapai perbaikan kehidupan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut dibutuhkan berbagai macam pendekatan dan strategi, baik dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Salah satu strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat kabupaten/kota adalah merumuskan RPJMD dan dari RPJMD itu diteruskan menjadi tahapan-tahapan tahunan dan disebut dengan RKPD. Prinsipnya penyusunan RKPD tidak boleh bertentangan dengan RPJMD.

Begitu pula dengan RKPD yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Penyusunan RKPD tersebut dimaksudkan untuk lebih memperjelas dan mempermudah arah serta pelaksanaan program-program pembangunan sehingga tepat sasaran dan mempermudah dalam melakukan pengawasan sehingga memperkecil kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam kaitan dengan dilakukan evaluasi terhadap RPJKM Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 ini, ditekankan pada tiga bidang, yakni (1) bidang pendidikan, (2) bidang kesehatan dan (3) bidang daya

beli. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dapat digambarkan seperti pada uraian berikut ini.

2.2. Evaluasi Bidang Pendidikan.

Penduduk besar merupakan modal dasar pembangunan suatu daerah atau wilayah. Ungkapan tersebut menjadi benar, bilamana penduduk suatu daerah tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Namun sebaliknya, jika penduduk tersebut sebagian besar tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam pembangunan, tentu menjadi beban pembangunan dan bukan modal pembangunan.

Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dapat diukur dari tingkat pendidikan masyarakat. Begitu pula halnya dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Jembrana. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan berbagai kebijakan dan program-program di bidang pendidikan, seperti subsidi pendidikan dalam bentuk pembebasan iuran pendidikan terhadap siswa-siswa yang bersekolah di sekolah negeri.

Selanjutnya dalam melakukan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dibandingkan dengan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006. Membandingkan antara RPJMD dengan RKPD tersebut akan dilihat dari dua aspek, yakni sasaran dan

program. Lebih jelasnya kedua aspek tersebut diuraikan seperti berikut ini.

2.2.1. Sasaran Pendidikan Dalam RPJMD Tahun 2006-2010

Sasaran umum kebijakan Pemerintah Kabupaten Jemberana di bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas masyarakat. Dalam RPJMD Kabupaten Jemberana tahun 2006-2010 sasaran bidang pendidikan diformulasikan sebanyak 15 (limabelas) sasaran dan lebih jelasnya disajikan seperti berikut ini.

1. Menurunnya secara berarti jumlah penduduk berusia 15 ke atas yang buta huruf.
2. Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun.
3. Meningkatnya APK dan APM.
4. Angka DO yang terus menurun.
5. Lama belajar rata-rata di atas 7 tahun.
6. Relevansi lulusan dengan lapangan kerja mencapai 75 %
7. Pendidikan dasar sembilan tahun yang antara lain diukur dengan Wajib Belajar.
8. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini.
9. Meningkatnya proporsi penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

10. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/SMP/SMPLB ke jenjang pendidikan menengah.
11. Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan dengan menurunnya angka mengulang kelas.
12. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat termasuk antara penduduk perkotaan dan pedesaan serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.
13. Meningkatnya proporsi pendidikan formal dan non formal memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar yang disesuaikan pula dengan perkembangan jumlah peserta didik.
14. Meningkatnya kualitas hasil belajar yang diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar.
15. Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat.

Sementara itu, sasaran bidang pendidikan dalam RKPD 2006 Kabupaten Jember. telah diformulasikan seperti berikut ini.

1. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK), meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM), meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS).
2. Menurunkan angka buta aksara
3. Menurunkan angka putus sekolah atau *drop out*

4. Meningkatnya lama belajar rata-rata di atas 7 tahun
5. Meningkatnya secara nyata prosentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun
6. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan
7. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antara kelompok masyarakat, yakni antara desa dengan kota, kaya dan miskin serta antara laki-laki dan perempuan.
8. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.

2.2.2. Program Dalam RPJMD Tahun 2006-2010.

Dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010 telah dirumuskan 10 (sepuluh) program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Jember. Kesepuluh program tersebut adalah seperti berikut ini.

1. Program pendidikan usia dini
2. Program wajib belajar pendidikan 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun
3. Peningkatan mutu tenaga pendidikan
4. Peningkatan sarana dan prasarana dengan pola block grant
5. Sekolah kajian
6. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
7. Program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda
8. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

9. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
10. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

2.2.3. Program Dalam RKPD Tahun 2006.

Dalam RKPD 2006 telah pula dirumuskan program pembangunan bidang pendidikan. Terdapat 8 program yang telah tersusun seperti berikut ini.

1. Program pendidikan usia dini
2. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun
3. Program pendidikan non formal
4. Program pendidikan menengah
5. Program sekolah kajian
6. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
7. Program peningkatan mutu tenaga pendidikan
8. Program manajemen pelayanan pendidikan

2.2.4. Kegiatan Dalam RKPD Tahun 2006

RPJMD 2006-2010 merupakan roh dari RKPD 2006. Oleh karena itu seluruh kegiatan dalam RKPD 2006 tidak boleh menyimpang dengan program-program dalam RPJMD 2006-2010. Adapun kegiatan-kegiatan dalam RKPD 2006 di Kabupaten Jember seperti berikut ini.

1. Rehab ruang kelas SD (DAK)
2. Pendamping DAK (Rehab SD)

3. Pendamping DBEP
4. Rehab ruang kelas SMP, SMA/SMK
5. Pengadaan komputer (Lab Komputer SMP, SMA/SMK)
6. Pengadaan sarana/alat peraga KBM, TK, SD, SMP, SMA, SMK.
7. Pengadaan sarana olah raga SD, SMP, SMA, SMK.
8. Unit gedung baru (UBG) TK
9. Penambahan ruang kelas baru (RKB) SD
10. UAS dan UAN SD, SMP, SMA, SMK
11. Rehab ruang kelas SD, SMP, SMA, SMK Negeri
12. Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB)
13. Pengadaan RPL (Ruang Penunjang lainnya)
14. Pengadaan sarana/alat peraga KBM TK, SD, SMP, SMA, SMK.
15. Pengadaan sarana olah raga SD, SMP, SMA, SMK.
16. Praktikum lab SMP, SMA dan SMK.
17. Diklat guru bidang studi SMP, SMA dan SMK.
18. Pengadaan Komputer (Lab Komputer) SMP, SMA dan SMK.
19. Rehab ruang kelas SD, SMP, SMA, SMK Negeri
20. Buku Paket dan Penunjang SD, SMP, SMA dan SMK.
21. Pengadaan Ruang Kelas Baru SMP, SMA, SMK
22. Pengadaan RPL (Ruang Penunjang Lainnya)
23. Pengadaan Komputer dan Lab SMP, SMA, SMK.
24. UAS dan UAN SD, SMP, SMA dan SMK.
25. Pekan Olah Raga Pelajar Tingkat Kabupaten (POPDA)
26. Kelompok Pemuda Produktif

27. Pematangan atlet hasil penyaringan POPDA.
28. Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP).
29. POPDA tingkat provinsi.
30. Pemuda Pelopor
31. Pengadaan Sarana Olah raga.
32. Pendidikan kesetaraan SMU
33. Paskibraka
34. Olah raga tradisional
35. Kelompok belajar usaha (KBU)
36. Napak Tilas Jejak Pahlawan
37. Pembinaan Klub Olah raga
38. Pendidikan kesetaraan SLTP (Paket B setara SLTP)
39. Pendidikan kesetaraan SMU
40. Kelompok Belajar Usaha KBU)
41. Magang/Beasiswa
42. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
43. Padu Kelompok Bermain
44. Gender
45. Pendidikan Kesetaraan SD Kelas 6 (Paket A setara SD)
46. Pendidikan kesetaraan SLTP (Paket B)
47. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
48. Magang/Beasiswa
49. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
50. Pendidikan keaksaraan fungsional (KP) paket A

2.2.5. Evaluasi RPJMD Tahun 2006-2010

Dalam melakukan evaluasi terhadap RPJMD 2006-2010 atas dasar RKPD 2006 dengan penekanan evaluasi dari bidang pendidikan akan dilihat dari dua aspek, yakni (1) aspek ketaatasasan atau konsistensi dan (2) aspek kontinuitas. Lebih jelasnya kajian dari dua aspek tersebut diuraikan seperti berikut ini.

2.2.5.1. Aspek Ketaatasasan atau Konsistensi

Memperhatikan **sasaran** pembangunan bidang pendidikan yang tertuang dalam RPJMD 2006-2010 terdiri dari 15 sasaran sebagaimana tersebut di atas dan sasaran bidang pendidikan yang tertuang dalam RKPD 2006 Kabupaten Jembrana terdiri dari 8 sasaran, maka dapat dinyatakan bahwa secara kuantitatif sasaran bidang pendidikan yang tercantum dalam RKPD 2006 Kabupaten Jembrana telah mencapai 53,33% dari sasaran bidang pendidikan pada RPJMD 2006-2010.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada sasaran bidang pendidikan di RKPD 2006, tercantum sasaran, yakni “meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan”, tetapi dalam RPJMD 2006-2010, sasaran yang berhubungan atau berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan tidak tercantum sebagai salah satu sasaran.

Memperhatikan kondisi seperti tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa dilihat dari aspek sasaran bidang pendidikan dalam RKPD 2006

ternyata telah dikembangkan dalam cakupan yang lebih luas, bila dibandingkan dengan sasaran pendidikan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010. Jadi secara umum dapat dikatakan kondisi tersebut masih berada dalam konteks taat asas.

Selanjutnya memperhatikan **program** pembangunan bidang pendidikan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010 yang mana terdiri dari 10 program sebagaimana tersebut di atas dan program bidang pendidikan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jember tahun 2006 terdiri dari 8 program, maka dapat dinyatakan bahwa secara kuantitatif program bidang pendidikan yang tercantum dalam RKPD tersebut telah mencapai 80% dari program bidang pendidikan pada RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010.

Kendatipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa 2 program bidang pendidikan dalam RKPD Kabupaten Jember tahun 2006, yakni (1) program pendidikan non formal dan (2) program manajemen pelayanan pendidikan, belum secara eksplisit mengacu pada program pendidikan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010.

Memperhatikan kondisi seperti tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa 2 (dua) program bidang pendidikan dalam RKPD Kabupaten Jember tahun 2006 belum sepenuhnya mengacu pada program pendidikan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010.

Sementara itu, hasil evaluasi antara program-program pendidikan yang tercantum RKPD Kabupaten Jember tahun 2006, dibandingkan

dengan kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang telah dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, ternyata telah memiliki kesesuaian atau konsistensi. Artinya dari 8 program bidang pendidikan telah menjiwai dan meliputi seluruh kegiatan yang disajikan dalam matrik kegiatan pada RKPD Kabupaten Jembrana 2006.

2.2.5.2. Aspek Kontinuitas atau Keberlanjutan

Secara umum sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 di bidang pendidikan, dibandingkan sasaran bidang pendidikan Kabupaten Jembrana tahun yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, ternyata masih memiliki hubungan dan relevansi yang signifikan. Kendatipun dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 telah terjadi pengembangan sasaran, yang mana dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 tidak secara eksplisit mencantumkan sasaran pembangunan fisik atau sarana dan prasarana pendidikan, namun dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 terdapat sasaran pembangunan fisik, terutama dalam pengadaan sarana dan prasarana di Kabupaten Jembrana tahun dan prasarana di bidang pendidikan.

Begitu pula dilihat dari aspek program, bahwa RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 sebagai turunan dari RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010, ternyata menunjukkan bahwa program-program di bidang pendidikan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan program-

program pendidikan sebagaimana yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Hal itu menandakan bahwa telah terjadi kontinuitas atau keberlanjutan secara hirarkhis antara RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dengan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Selanjutnya, memperhatikan seluruh kegiatan pendidikan yang tercantum dalam matrik rencana kerja dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, ternyata secara umum telah sejalan dengan program bidang pendidikan dalam RPKD Kabupaten Jembrana tahun 2006. Atau secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang telah dirumuskan dalam matrik rencana kerja RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 tersebut merupakan turunan atau penjabaran dari program bidang pendidikan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006. Hanya saja, masih ditemukan kegiatan pada matrik tersebut terkesan tumpang tindih, bahkan muncul dalam posisi terpisah, seperti kegiatan no 5 sama dengan no 18, kegiatan no 6 sama dengan 14, kegiatan no 7 sama dengan 15, kegiatan no 10 sama dengan 24, kegiatan no 40 sama dengan 47 dan kegiatan no 41 sama dengan no 48. Padahal dilihat dari indikator, tolok ukur kinerja, dan target kinerja adalah sama. Kendatipun dilihat dari sumber pembiayaannya berbeda.

Sebagai contoh kegiatan (No. Urut 5, 18 dan 23) pada program pendidikan, yakni kegiatan pengadaan komputer untuk SMP, SMA dan

SMK, ternyata kegiatan tersebut tiga kali muncul dalam matrik rencana kerja. Hal itu menunjukkan bahwa belum terpenuhi unsur kehati-hatian dalam menyusun kegiatan.

2.3. Evaluasi Bidang Kesehatan.

Tingkat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator Indek Pembangunan Manusia (**IPM**). Suatu negara dengan tingkat kesehatan penduduknya rendah, tentu IPM negara tersebut rendah. Dan penduduk dengan tingkat kesehatan rendah, di samping membawa implikasi terhadap IPM, juga menjadi beban pembangunan. Namun sebaliknya, bila penduduk suatu negara atau wilayah memiliki tingkat kesehatan tinggi, maka penduduk tersebut dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan.

Suatu daerah yang berhasil dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dapat pula diukur dari tingkat kesehatan masyarakat. Begitu pula halnya dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Jembrana. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan berbagai kebijakan dan program-program di bidang kesehatan, seperti subsidi biaya kesehatan.

Pembangunan kesehatan masyarakat wajib dipandang sebagai investasi. Oleh karena masyarakat yang sehat secara langsung berimplikasi positif terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam kaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana di bidang pembangunan kesehatan masyarakat, telah disusun RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dan untuk melihat apakah RPJMD tersebut telah dapat berjalan sebagaimana direncanakan, maka dipandang perlu untuk melakukan evaluasi.

Selanjutnya untuk mengevaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 akan dibandingkan dengan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006. Dalam membandingkan antara RPJMD dengan RKPD tersebut akan dilihat dari dua aspek, yakni sasaran dan program. Lebih jelasnya kedua aspek tersebut diuraikan seperti berikut ini.

2.3.1. Sasaran Kesehatan RPJMD Tahun 2006-2010

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana di bidang kesehatan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 sasaran bidang kesehatan diformulasikan sebanyak 4 (empat) sasaran dan lebih jelasnya disajikan seperti berikut ini.

1. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.
2. Menurunnya angka kematian bayi di masyarakat
3. Menurunnya angka kematian ibu
4. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita

Sementara itu, sasaran bidang kesehatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, telah diformulasikan sebanyak 6 (enam sasaran). Hal itu menunjukkan sasaran bidang kesehatan dalam RKPD Kabupaten

Jembrana tahun 2006 lebih dikembangkan, bila dibandingkan dengan sasaran kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Jembrana 2006-2010. Lebih jelasnya keenam sasaran tersebut seperti berikut ini.

1. Meningkatnya proporsi keluarga yang hidup secara bersih dan sehat
2. Meningkatnya proporsi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, utamanya masyarakat miskin
3. Menurunnya angka kesakitan dan kematian
4. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita
5. Meningkatnya usia harapan hidup
6. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, utamanya tenaga dan peralatan medis

2.3.2. Program Kesehatan RPJMD Tahun 2006-2010.

Dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah dirumuskan 3 (tiga) program pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Jembrana. Ketiga program tersebut adalah seperti berikut ini.

1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
2. Program lingkungan sehat
3. Program upaya kesehatan masyarakat

2.3.3. Program Kesehatan RKPD Tahun 2006.

Pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 telah pula dirumuskan program pembangunan bidang kesehatan. Terdapat enam program yang telah tersusun seperti berikut ini.

1. Program upaya kesehatan masyarakat
2. Program upaya kesehatan perseorangan
3. Program pencegahan dan pembrantasan penyakit
4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
5. Program lingkungan sehat
6. Program jaminan kesehatan

Memperhatikan program kesehatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 sebanyak 6 program dan program kesehatan dalam RPJKM Kabupaten Jembrana 2006-2010 sebanyak 3 program, maka dapat dinyatakan bahwa program kesehatan tersebut telah mengalami perluasan. Walaupun demikian, perluasan tersebut tidak bertentangan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010.

2.3.4. Kegiatan Kesehatan RKPD Tahun 2006

RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah dipakai sebagai roh atau pijakan dasar dalam menyusun RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006. Oleh karena itu seluruh kegiatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 tidak menyimpang dengan program-program dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Adapun kegiatan-kegiatan bidang kesehatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 seperti berikut ini.

1. Posyandu
2. PADU Kelompok Bermain

3. Gender
4. Pelayanan kesehatan perorangan
5. Usaha kesehatan sekolah (UKS)
6. Pencegahan dan pemberantasan deman berdarah
7. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAK)
8. Pendamping DAK pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
9. Pengelolaan obat dan urusan RT gudang.
10. Pencegahan dan pemberantasan malaria.
11. Pelayanan kesehatan rujukan.
12. Perbaikan gizi masyarakat
13. Pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS
14. Pelayanan kesehatan penunjang.
15. Kesehatan USILA
16. Peran serta masyarakat.
17. Pelayanan kesehatan dasar.
18. Pencegahan dan pemberantasan TBC.
19. Pencegahan penyakit (Imunisasi)
20. Pengawasan makanan dan minuman
21. Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum.
22. Pengawasan dan penyehatan lingkungan pemukiman.
23. Pencegahan dan pemberantasan rabies.
24. Pencegahan dan pemberantasan taeniasis

25. Pencegahan dan pemberantasan filarisis
26. Pencegahan dan pemberantasan DBD
27. Pencegahan dan pemberantasan malaria.
28. Pencegahan dan pemberantasan TBC
29. Pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS
30. Pencegahan dan pemberantasan kusta
31. Pencegahan penyakit (imunisasi)
32. Pencegahan dan pemberantasan diare
33. Pencegahan dan pemberantasan ISPA
34. Pengawasan dan penelitian air.
35. Pemeriksaan makanan dan minuman
36. Perbaikan lingkungan pemukiman
37. Pemeriksaan tempat-tempat umum
38. Pengadaan alat-alat medis dan sarana laboratorium Puskesmas
39. Peningkatan kegiatan PKM
40. Peningkatan kegiatan UKS
41. Peningkatan kesehatan USILA
42. Pemantauan dan evaluasi PHBS
43. Peningkatan kegiatan POSYANDU
44. Peningkatan kegiatan gizi
45. Pencegahan dan pemberantasan DBD
46. Pencegahan dan pemberantasan malaria
47. Pencegahan dan pemberantasan TBC.
48. Pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS

49. Pengadaan lemari es standar vaksin elektrolux
50. Pengadaan spuit untuk imunisasi BCG
51. Pengadaan alat medis
52. Pengadaan sarana PKM
53. Pengadaan UKS Kit
54. Pengadaan sepeda motor untuk operasional PHBS
55. Pengadaan sarana perimbangan untuk kegiatan revitalisasi posyandu.
56. Pengadaan sarana operasional kegiatan peningkatan gizi masyarakat.
57. Peningkatan kesehatan USILA
58. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
59. Pengawasan dan penelitian air.
60. Pembebasan tanah pembangunan Puskesmas Mendoyo
61. Penyusunan profil kesehatan tahun 2005
62. Posyandu
63. PADU kelompok bermain
64. Gender

2.3.5. Evaluasi RPJMD Tahun 2006-2010

Dalam melakukan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 atas dasar RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 dengan penekanan evaluasi dari bidang kesehatan juga dilihat dari dua aspek. Kedua aspek tersebut meliputi ; (1) aspek ketaatan atau

konsistensi dan (2) aspek kontinuitas. Lebih jelasnya kajian dari dua aspek tersebut diuraikan seperti berikut ini.

2.3.5.1. Aspek Ketaatasasan atau Konsistensi

Sasaran pembangunan bidang kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 terdiri dari 4 sasaran. Sementara itu, dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 terdiri dari 6 sasaran. Bila diperhatikan dari aspek kuantitas, maka sasaran bidang kesehatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 tersebut lebih banyak dibandingkan dengan sasaran bidang kesehatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Kondisi seperti merupakan suatu kewajaran secara hirarkhis karena RKPD merupakan turunan dari RPJMD. Hanya saja dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 pada sasaran bidang kesehatan belum secara nyata mencantumkan sasaran yang berkaitan dengan pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, tetapi dalam sasaran RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, tertuang sasaran tentang meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, utamanya tenaga dan peralatan medis.

Adanya kondisi seperti tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa dilihat dari aspek sasaran bidang kesehatan, ternyata RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 sudah sepenuhnya mengacu pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Bahkan sasarnya lebih

dikembangkan. Oleh karena itu telah terjadi ketaatasasan pada penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006.

Dilihat dari aspek program pembangunan bidang kesehatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 terdiri dari 3 program sebagaimana tersebut di atas dan program bidang kesehatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 terdiri dari 6 program, maka dapat dinyatakan bahwa secara kuantitatif program bidang kesehatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 Kabupaten Jembrana telah melampaui program bidang kesehatan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Hal itu menunjukkan secara yuridis telah memenuhi asas kepatutan karena secara hirarkhis RPJMD memiliki kedudukan lebih tinggi dari RKPD.

Sementara itu, dari 6 program kesehatan yang tercantum RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, telah dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan bidang kesehatan sebanyak 64 kegiatan sebagaimana telah dirumuskan dalam matrik rencana kerja pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006. Selanjutnya memperhatikan antara program dengan kegiatan, ternyata telah memiliki kesesuaian atau konsistensi. Artinya dari 6 program bidang kesehatan telah menjadi dasar pijakan dalam penyusunan kegiatan, sehingga program telah menjiwai dan meliputi seluruh kegiatan yang disajikan dalam matrik rencana kerja bidang kesehatan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006.

Kendatipun dinyatakan telah memiliki konsistensi antara program dengan kegiatan di bidang kesehatan, namun masih terdapat penggandaan pencantuman kegiatan. Hal itu terlihat bahwa seperti kegiatan no 1 sama dengan no 62, kegiatan no 2 sama dengan no 63, kegiatan no 3 sama dengan no 64, kegiatan no 6 sama dengan no 26, kegiatan no 10 sama dengan no 27, kegiatan no 13 sama dengan no 29, kegiatan no 18 sama dengan no 28, kegiatan no 19 sama dengan no 31 kegiatan no 15 sama dengan no 41, dan kegiatan no 20 sama dengan kegiatan no 35.

2.3.5.2. Aspek Kontinuitas atau Kesenambungan

Sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 di bidang kesehatan, dibandingkan dengan sasaran bidang kesehatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, ternyata telah memiliki hubungan dan relevansi yang signifikan. Kendatipun dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 telah terjadi pengembangan sasaran, yang mana dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 terdapat 4 sasaran dan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 terdapat 6 sasaran. Secara implisit dan eksplisit sasaran bidang kesehatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran bidang kesehatan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010.

Begitu pula dilihat dari aspek program bahwa RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 sebagai turunan dari RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010, ternyata menunjukkan bahwa program-program di bidang kesehatan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dengan program-program kesehatan sebagaimana yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Hal itu menandakan bahwa telah terjadi kontinuitas atau keberlanjutan baik secara hirarkhis maupun secara yuridis antara RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dengan RKPD Kabupaten Jembrana tahun Kabupaten Jembrana tahun 2006.

Begitu pula bila memperhatikan seluruh kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam matrik rencana kerja dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, ternyata secara komprehensif telah sejalan dengan program bidang kesehatan pada RPKD Kabupaten Jembrana tahun 2006. Atau secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan bidang kesehatan yang telah dirumuskan dalam matrik RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 telah merupakan turunan dari program bidang kesehatan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006.

Hanya saja, masih ditemukan kegiatan pada matrik tersebut terkesan tumpang tindih, bahkan muncul dalam posisi terpisah. Padahal dilihat dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja adalah sama, kendatipun sumber pembiayaan berbeda. Adanya penggandaan kegiatan

tersebut menunjukkan bahwa belum terpenuhi unsur kehati-hatian dalam menyusun kegiatan dalam matrik rencana kerja dalam RKPD Kabupaten Jember tahun 2006.

2.4. Evaluasi Bidang Daya Beli

Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masalah sosial. Artinya, semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat, maka semakin tinggi intensitas masalah sosial dalam masyarakat. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat kesejahteraan masyarakat relatif baik, maka cenderung masalah sosial dan penyakit sosial relatif kecil tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut.

Suatu daerah dengan tingkat kesejahteraan penduduknya rendah, tentu IPM daerah tersebut rendah pula. Dan penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah, di samping membawa implikasi terhadap IPM, juga menjadi beban bagi suatu daerah dalam pembangunan. Namun, bila penduduk suatu daerah dengan tingkat kesejahteraan tinggi, maka penduduk tersebut dapat menjadi pendorong pembangunan dalam segala bidang, termasuk pembangunan ekonomi.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan suatu potensi dan secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Begitu pula dengan harapan Pemerintah Kabupaten Jember. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan berbagai kebijakan dan program-program di bidang

peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan daya beli, seperti menyalurkan batuan dana bergulir dan melakukan revitalisasi di bidang pertanian.

Dalam kaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana tersebut telah disusun RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dan untuk melihat apakah RPJMD tersebut telah dapat berjalan sebagaimana direncanakan, maka dipandang perlu untuk melakukan evaluasi.

Selanjutnya untuk mengevaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010, terutama di bidang daya beli akan dibandingkan dengan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006. Dalam membandingkan antara RPJMD dengan RKPD tersebut akan dilihat dari dua aspek, yakni sasaran dan program. Lebih jelasnya kedua aspek tersebut diuraikan seperti berikut ini.

2.4.1. Sasaran RPJMD Tahun 2006-2010 Dalam Daya Beli.

Pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 terdapat 5 sasaran yang ingin dicapai dalam kaitan dengan peningkatan daya beli masyarakat Jembrana. Kelima sasaran tersebut diuraikan seperti berikut ini

1. Terjaganya kemantapan ketersediaan beras dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan sawah.

2. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.
3. Difersifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam dengan gizi berimbang untuk menurunkan ketergantungan pada beras.
4. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian
5. Meningkatnya produksi perdagangan hasil pertanian

Selanjutnya sasaran dalam bidang peningkatan daya beli masyarakat pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 telah diformulasikan sebanyak 8 (delapan) sasaran. Lebih jelasnya seperti berikut ini.

1. Terjaganya kemantapan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian dalam arti luas, termasuk perairan laut.
2. Meningkatnya kemampuan petani dan nelayan dalam menghasilkan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif
3. Meningkatnya usaha agro bisnis dengan penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi
4. Meningkatnya sarana serta prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian
5. Meningkatnya pemasaran produk Jembrana, utamanya ekspor hasil pertanian

6. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di pedesaan, utamanya lapangan kerja non pertanian
7. Meningkatnya produktivitas usaha kecil dan menengah di pedesaan
8. Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan desa dalam mendorong kegiatan usaha di pedesaan.

Adanya pengembangan sasaran pada RKPD Kabupaten Jembrana 2006 tersebut menandakan bahwa telah terjadi pengembangan sasaran, bila dibandingkan dengan sasaran pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Hal itu adalah sebuah kepatutan karena kedudukan RPJMD lebih tinggi dari pada RKPD.

2.4.2. Program Daya Beli RPJMD Tahun 2006-2010.

Dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah dirumuskan 4 (empat) program pembangunan bidang peningkatan daya beli di Kabupaten Jembrana. Keempat program tersebut adalah seperti berikut ini.

1. Peningkatan mutu dan jumlah produk pertanian
2. Program peningkatan penghasilan (pendapatan)
3. Program proteksi pertanian
4. Pembinaan KK miskin khususnya petani dan nelayan kecil

2.4.3. Program Daya Beli RKPD Tahun 2006.

Pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 telah pula dirumuskan program pembangunan peningkatan daya beli masyarakat.

Dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 terdapat sembilan program yang telah tersusun seperti berikut ini.

1. Program peningkatan ketahanan pangan.
2. Program pengembangan agribisnis.
3. Program difusi dan pemanfaatan iptek.
4. Program Pengembangan komoditi unggulan dan komoditi ekspor.
5. Program Peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan hasil pertanian.
6. Program pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM).
7. Program Pembinaan koperasi dan lembaga keuangan desa.
8. Program bantuan dana bergulir.
9. Program pemasaran produk Jembrana.

Memperhatikan jumlah program dalam RPJMD maupun RKPD tersebut di atas, ternyata pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 telah terjadi pengembangan program. Pengembangan program tersebut masih memiliki hubungan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010.

2.4.4. Kegiatan Bidang Peningkatan Daya Beli RKPD Tahun 2006

RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 merupakan landasan dasar dari RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006. Oleh karena itu seluruh kegiatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 tidak boleh menyimpang dengan program-program yang telah teruang pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Adapun

kegiatan-kegiatan bidang peningkatan daya beli dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 seperti berikut ini.

1. Pembinaan monitoring dan evaluasi dana talangan.
2. Fasilitas Perbaikan dan pemeliharaan kapal ikan (DAK).
3. Pendampingan DAK (fasilitas perbaikan dan pemeliharaan kapal ikan).
4. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian untuk ketahanan pangan (DAK).
5. Pendamping DAK (peningkatan sarana dan prasarana pertanian untuk ketahanan pangan).
6. Pelayanan faksinasi dan pengobatan hewan.
7. Operasi terpadu penanggulangan gangguan keamanan Hutan Bali Barat.
8. Pengembangan kelompok industri masyarakat perkebunan (KIMBUN) sentra komoditas perkebunan.
9. Operasional BBP padi, palawija dan hortikultura.
10. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana TPI Pengembangan.
11. Pelayanan kegiatan kawin suntik.
12. Pemeriksaan perijinaan penebangan kayu rakyat (IPKR).
13. Perlindungan tanaman / OPT perkebunan.
14. Deplot penggunaan pupuk organik padi.
15. Pembangunan TPI Candikusuma.
17. Pengembangan integrasi usaha tani kambing dan Kakau..
18. Pemeliharaan trumbusan hutan produksi terbatas.

19. Pendataan statistik tanaman perkebunan.
20. Denplot penggunaan pupuk organik pada semangka.
21. Pengembangan intensifikasi budidaya ikan.
22. Pembinaan kelompok tani ternak pelaksanaan anjuran teknis.
23. Pengukuran dan pengujian batang kayu tuanan dan lelang hasil hutan.
24. Peningkatan peran APKAI dan APCI di Kabupaten Jember.
25. Pemberdayaan kelompok tani / SLPHT (proyek organik).
26. Pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan.
27. Pengumpulan data potensi peternakan.
28. Pembinaan / penyuluhan pengembangan sutera alam dan lebah madu.
29. Denplot panili.
30. Pengadaan pestisida untuk pengendalian OPT.
31. Pengendalian hama penyakit ikan.
32. Pengambilan data dan pemeriksaan spesimen.
33. Dana pendampingan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan.
34. Puncak penghijauan dan konservasi alam nasional dan pemeliharannya.
35. Rehabilitasi kawasan budidaya tambak dengan tanaman mangrove.
36. Pengembangan hijauan tanaman makanan ternak unggul.
37. Rehabilitasi jaringan irigasi pedesaan dan pembinaan tataguna air.
38. Pembuatan patok perahu di kecamatan Melaya
39. Subsidi susu kambing untuk siswa sekolah dasar.

40. Pembangunan fasilitas pos timbang ikan
41. Bantuan dana bergulir dan pembinaan petani nelayan kecil (PNK) pola eksekutting.
42. Penguatan modal usaha pengembangan agribisnis sapi, pembibitan melalui pola eksekuting.
43. Pengadaan sarana pengelolaan kakao.
44. Pengembangan benih ketan varietas unggul.
45. Intensifikasi kakao.
46. Bantuan operasional pengamanan hutan dan desa pakeraman.
47. Diversifikasi kakao.
48. Pengadaan sarana pengolahan kakao.
49. Monitoring epidemiologi penyakit hewan.
50. Penjaringan bibit sapi.
51. Pengolahan pakan ternak berbasis bahan lokal.
52. Pengawasan penanggulangan penyelundupan sapi.
53. Pemberdayaan klasifikasi kelas kemampuan kelompok ternak.
54. Rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan sarana BBI Tegak Gede.
55. Bantuan DPM Luek untuk pembelian gabah petani (Dana Talangan Pola Eksekuting).
56. Pemberdayaan kelompok wanita tani.
57. Bantuan dana untuk penguatan modal usaha ekonomi untuk opkoop benih (Dana Talangan).
58. Pengembangan sentra palawija berbasis pupuk organik.
59. Penangan panen dan pasca panen ketahanan pangan.

60. Penyediaan pestisida untuk pengendalian OPT.
61. Pembuatan susu kedelai untuk sekolah dasar.
62. Pembuatan rumpon.
63. Rehabilitasi prasana jaringan irigasi pertambakan.
64. Budidaya tambak berwawasan lingkungan.
65. Pengembangan sentra bibit babi.
66. Pengembangan sentra penggemukan sapi dan pengolahan limbah.
67. Pengembangan agribisnis bibit sapi.
68. Pengembangan kerbau mekepung dan kambing melalui teknologi inseminasi buatan (Kawin suntik/IB).
69. Peningkatan produktivitas padi (BLL).
70. Peningkatan agrobisnis pisang (BLL).
71. Pemberdayaan penyuluhan pertanian.
72. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH/Gerhan).
73. Pelayanan perijinan, monitoring, evaluasi serta sosialisasi.
74. Pemberdayaan Pokmas.
75. Pemberdayaan koperasi melalui peningkatan kelembagaan dan usaha.
76. Pameran industri kecil di Kabupaten, Propinsi dan nasional.
77. Program pengembangan kecamatan.
78. Peningkatan partisipasi anggota masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan KUKM.
79. Pelaksanaan pengawasan dan tera ulang takaran, timbangan dan perlengkapannya (UPTP).

80. Pengawasan terhadap minuman beralkohol.
81. Pengawasan terhadap penjualan dan peredaran barang di pasar.
82. Program terpadu penanggulangan kemiskinan.
83. Sosialisasi dan promosi dalam rangka pemasaran produk unggulan kabupaten Jembrana.
84. Pusat Informasi Jembrana di Denpasar.
85. Pameran produksi ekspor (PPE).
86. Pusat Informasi Produksi Jembrana di Negara.
87. Pengendalian dan pemantauan dana bergulir, KUT dan usaha koperasi.
88. Kemitraan usaha pengadaan, pengolahan dan pemasaran kakao, perkuatan modal kerja kakao UKM.
89. Pemberdayaan dan perkuatan usaha koperasi Bali.
90. Penanggulangan kemiskinan.
91. Pembangunan sarana pasar.
92. Bantuan sarana pengangkut sampah untuk sembilan pasar di Kabupaten Jembrana.
93. Pembuatan tempat parkir di pasar Yehembang.
94. Temu usaha/sarasehan pelaku usaha.
95. Peningkatan kualitas hasil produk hasil pertanian dan kehutanan.
96. Peningkatan mutu warna benang
97. Peningkatan keterampilan teknik produksi (desain).
98. Peningkatan manajemen/kewirausahaan.
99. Peningkatan mutu produk pangan.

100. Peningkatan iklim pendukung usaha (KUKM) Bali.
101. Penataan kebijakan peningkatan kewirausahaan dan daya saing KUKM Bali di Jembrana.
102. Program Pengembangan Kecamatan.
103. Motivasi perkembangan permodalan LPD dan pengelolaanya.
104. Pemberian subsidi bunga kredit pembangunan pasar inpres swadaya.
105. KPEL.

2.4.5. Evaluasi RPJMD Tahun2006-2010 Atas Dasar RKPD Tahun 2006

Dalam melakukan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 atas dasar RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 dengan penekanan evaluasi dari bidang peningkatan daya beli juga dilihat dari dua aspek. Kedua aspek tersebut meliputi ; (1) aspek ketaatasasan atau konsistensi dan (2) aspek kontinuitas. Lebih jelasnya kajian dari dua aspek tersebut diuraikan seperti berikut ini.

2.4.5.1. Aspek Ketaatasasan atau Konsistensi

Sasaran pembangunan peningkatan daya beli masyarakat dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 sasaran. Sementara itu, dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 terdiri dari 8 sasaran. Bila diperhatikan dari aspek kuantitas, maka sasaran bidang peningkatan daya beli dalam RKPD Kabupaten

Jembrana tahun 2006 tersebut lebih banyak dibandingkan dengan sasaran bidang peningkatan daya beli yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Kondisi seperti itu merupakan suatu kewajaran secara hirarkhis karena RKPD merupakan turunan dari RPJMD. Hanya saja dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 pada sasaran bidang peningkatan daya beli tidak secara nyata mencantumkan sasaran yang berkaitan dengan meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan desa, tetapi dalam sasaran RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, tertuang sasaran tentang meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan desa.

Kondisi seperti tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa dilihat dari aspek sasaran bidang peningkatan daya beli, ternyata RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 sepenuhnya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Oleh karena itu, terlihat ada ketaatasasan pada penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 yang berhubungan dengan peningkatan daya beli masyarakat.

Memperhatikan aspek program pembangunan bidang peningkatan daya beli yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 terdiri dari 4 program sebagaimana tersebut di atas dan program bidang peningkatan daya beli yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 Kabupaten Jembrana terdiri dari 9 program, maka dapat dinyatakan bahwa secara kuantitatif program bidang peningkatan daya beli yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 telah melampaui program bidang peningkatan daya

beli pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Hal itu menunjukkan secara yuridis telah memenuhi asas kepatutan karena secara hirarkhis RPJMD memiliki kedudukan lebih tinggi dari RKPD.

Sementara itu, dari 9 program peningkatan daya beli yang tercantum pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, telah dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan bidang peningkatan daya beli sebanyak 105 kegiatan sebagaimana telah dirumuskan dalam matrik rencana kerja pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006.

Selanjutnya memperhatikan antara program dengan kegiatan, ternyata telah memiliki kesesuaian atau konsistensi. Artinya dari 9 program bidang peningkatan daya beli telah menjadi dasar pijakan dalam penyusunan kegiatan, sehingga program telah menjiwai dan meliputi seluruh kegiatan yang disajikan dalam matrik rencana kerja bidang peningkatan daya beli pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006.

2.4.5.2. Aspek Kontinuitas atau Kesenambungan

Sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 di bidang peningkatan daya beli, dibandingkan dengan sasaran bidang peningkatan daya beli yang teruang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, ternyata telah memiliki hubungan dan relevansi yang signifikan. Kendatipun dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 telah terjadi pengembangan sasaran, yang mana dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 terdapat 4 sasaran dan dalam RKPD terdapat 8 sasaran. Secara implisit dan eksplisit sasaran

bidang peningkatan daya beli dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran bidang peningkatan daya beli pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010

Begitu pula dilihat dari aspek program bahwa RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 sebagai turunan dari RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010, ternyata menunjukkan bahwa program-program di bidang peningkatan daya beli pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dengan program-program peningkatan daya beli sebagaimana yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Hal itu menandakan bahwa telah terjadi kontinuitas atau keberlanjutan baik secara hirarkhis maupun secara yuridis antara RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dengan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 di bidang peningkatan daya beli.

Selanjutnya memperhatikan seluruh kegiatan di bidang peningkatan daya beli sebagaimana tercantum dalam matrik rencana kerja dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, ternyata secara komprehensif telah sejalan dengan program bidang peningkatan daya beli pada RPKD Kabupaten Jembrana tahun 2006. Atau secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan bidang peningkatan daya beli yang telah dirumuskan dalam matrik rencana kerja dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 telah merupakan turunan dari program

bidang peningkatan daya beli pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006.

Kendatipun antara program dengan matrik rencana kerja pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 telah memiliki konsistensi dan keberlanjutan, namun masih ditemukan tumpang tindih kegiatan. Hal itu terlihat dari adanya kegiatan yang sama, muncul dua kali. Seperti kegiatan no 77 sama dengan kegiatan no 102.

2.5. Epilog

Berdasarkan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 atas dasar RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, ternyata secara umum RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah menjiwai, meliputi dan telah dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam menyusun RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006. Hanya secara spesifik terdapat sasaran pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 seolah-olah terkesan tidak taat asas dengan RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Kendatipun secara langsung maupun tidak langsung, tidak menimbulkan implikasi negatif dalam pelaksanaan pembangunan.

Begitu pula dengan program-program yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010, telah menjadi dasar pijakan dan acuan pokok dalam menyusun program-program pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006. Sehingga seluruh program pada

RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 telah memenuhi asas konsistensi dan kontinuitas.

Selanjutnya ditinjau dari aspek hubungan atau keterkaitan antara program-program dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 dengan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam matrik pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, ternyata telah pula mengikuti asas kepatutan dan ketaatan. Hanya saja beberapa kegiatan yang tertuang dalam matrik tersebut, ditemukan tumpang tindih. Artinya kegiatan yang sama, muncul lebih dari satu kali dalam matrik rencana kerja. Padahal indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja, kendatpun sumber biaya pada kegiatan-kegiatan yang muncul lebih dari satu kali tersebut adalah berbeda.

BAB III

EVALUASI RPJMD TAHUN 2006-2010 ATAS DASAR RKPD TAHUN 2007

3.1. Prolog

Pembangunan di Kabupaten Jembrana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan di Provinsi Bali, bahkan Indonesia. Secara umum pembangunan bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sebagai suatu proses tidak akan pernah berhenti, karena tuntutan dan keinginan manusia sebagai warga negara tidak terbatas.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut dibutuhkan berbagai macam pendekatan dan strategi, baik dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Salah satu strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat kabupaten/kota adalah merumuskan RPJMD dan dari RPJMD itu diteruskan menjadi tahapan-tahapan tahunan dan disebut dengan RKPD.

Di Kabupaten Jembrana strategi pembangunan dirancang dengan mengikuti ketentuan umum yang berlaku secara nasional. Seperti menyusun RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 yang dipergunakan sebagai pedoman dasar dalam merancang pembangunan tahunan. Penyusunan rancangan pembangunan tahunan dalam bentuk RKPD tersebut dimaksudkan untuk lebih memperjelas dan mempermudah arah atas pelaksanaan program-

program pembangunan sehingga tepat sasaran dan mempermudah dalam melakukan pengawasan.

Sebaik apapun rencana pembangunan tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu dalam memperkecil kelemahan tersebut dipandang perlu melakukan evaluasi. Begitu pula halnya dengan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Dalam kaitan dengan dilakukan evaluasi terhadap RPJMD tersebut, ditekankan pada tiga bidang, yakni (1) bidang pendidikan, (2) bidang kesehatan dan (3) bidang daya beli.

Adapun pertimbangan melakukan evaluasi dari tiga perspektif tersebut, di samping keterbatasan waktu, juga dilandasi atas program unggulan Kabupaten Jembrana yang menekankan pada tiga bidang tersebut dan ketiga bidang itu merupakan elemen atau unsur utama dalam indek pembangunan manusia (IPM).

3.2. Bidang Pendidikan.

Banyak faktor penyebab keberhasilan pembangunan. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Manusia atau penduduk yang terkelola dengan baik, sehingga berkualitas merupakan modal dasar pembangunan. Akan tetapi, jika penduduk yang besar tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dibutuhkan dalam pembangunan, tentu menjadi beban pembangunan.

Upaya meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan. Salah satu cara adalah dengan

mendorong pendidikan masyarakat. Begitu pula halnya dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Jember. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan berbagai kebijakan dan program-program di bidang pendidikan, seperti subsidi pendidikan dalam bentuk pembebasan iuran pendidikan terhadap siswa-siswa yang bersekolah di sekolah negeri. Sementara untuk di sekolah-sekolah swasta diberikan bantuan dan bea siswa.

Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Jember 2006-2010, khusus di bidang pendidikan akan dibandingkan dengan RKPD Kabupaten Jember 2007. Membandingkan antara RPJMD dengan RKPD tersebut akan dilihat dari dua aspek, yakni sasaran dan program.

3.2.1. Sasaran Pendidikan RPJMD Tahun 2006-2010

Dalam RPJMD Kabupaten Jember 2006-2010 sasaran bidang pendidikan diformulasikan sebanyak 15 (lima belas) sasaran. Adapun kelima belas sasaran tersebut disajikan seperti berikut ini.

1. Menurunnya secara berarti jumlah penduduk berusia 15 ke atas yang buta huruf.
2. Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun.
3. Meningkatnya APK dan APM.
4. Angka DO yang terus menurun.
5. Lama belajar rata-rata di atas 7 tahun.

6. Relevansi lulusan dengan lapangan kerja mencapai 75 %
7. Pendidikan dasar sembilan tahun yang antara lain diukur dengan Wajib Belajar.
8. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini.
9. Meningkatnya proporsi penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
10. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/SMP/SMPLB ke jenjang pendidikan menengah.
11. Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan dengan menurunnya angka mengulang kelas.
12. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat termasuk antara penduduk perkotaan dan pedesaan serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.
13. Meningkatnya proporsi pendidikan formal dan non formal memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar yang disesuaikan pula dengan perkembangan jumlah peserta didik.
14. Meningkatnya kualitas hasil belajar yang diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar.
15. Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan di atas, bahwa sasaran bidang pendidikan dalam RPJMD Kabupaten Jemberana 2006-2010, telah digambarkan dan diuraikan sebanyak 15 sasaran, maka pada tahap selanjutnya, sebelum dilakukan evaluasi, ada baiknya terlebih dahulu disajikan sasaran pendidikan dalam RKPD Kabupaten Jemberana 2007. Adapun sasaran yang telah diformulasikan seperti berikut ini.

1. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada anak usia dini, dari 3.772 orang tahun 2005 prediksi tahun 2006 menjadi 3.842 orang dan pada tahun 2007 menjadi 3.950 orang.
2. Meningkatnya secara nyata presentasi penduduk yang dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dari 87,14% tahun 2005, prediksi tahun 2006, 90,14% dan pada tahun 2007 menjadi 95%.
3. Meningkatnya APK SD dari 112,5%, SMP dari 97,57% dan SM dari 64,91% tahun 2005 prediksi tahun 2006 menjadi 114% SD, 9,9% SMP dan 70,99% SM serta 2007 menjadi 117% SD, 100% SD dan 95% SM.
4. Angka DO terus menurun, dari 0,02% tahun 2005 prediksi tahun 2006 menjadi 0,01% dan pada tahun 2007 menjadi 0,01%. Prediksi tahun 2006 menjadi 6,10 tahun dan tahun 2007 menjadi 6,0 tahun.
5. Lama belajar rata-rata dari 6,12 tahun pada tahun 2005, prediksi tahun 2006 menjadi 6,10 tahun dan pada tahun 2007 menjadi 6,0 tahun.

6. Relevansi lulusan dengan lapangan kerja dari 50% tahun 2005, prediksi tahun 2006 menjadi 55% dan pada tahun 2007 menjadi 60%.
7. Menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf 15 tahun ke atas dari 7% tahun 2005 prediksi tahun 2006 menjadi 4% dan tahun 2007 menjadi 1%.
8. Meningkatnya proporsi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dari 15,1% tahun 2005 dan tahun 2007 menjadi 20%.
9. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MPs/SMPLB ke jenjang pendidikan menengah 90,9% tahun 2005 prediksi tahun 2006 menjadi 95,9%, pada tahun 2007 menjadi 99%.
10. Meningkatnya kualitas hasil belajar yang diukur dengan meningkatnya presentasi siswa yang lulus hasil evaluasi belajar SD dari 95% tahun 2005, prediksi tahun 2006 menjadi 96% dan pada tahun 2007 menjadi 98%.

3.2.2. Program RPJMD Tahun 2006-2010.

Program pada RPJMD 2006-2010 telah dirumuskan 10 (sepuluh) program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Jember. Kesepuluh program tersebut adalah seperti berikut ini.

1. Program pendidikan usia dini
2. Program wajib belajar pendidikan 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun

3. Peningkatan mutu tenaga pendidikan
4. Peningkatan sarana dan prasarana dengan pola block grant
5. Sekolah kajian
6. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
7. Program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda
8. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
9. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
10. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

3.2.3. Program RKPD Tahun 2007.

Secara eksplisit tidak tercantum paogram pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007. Namun kalau diperhatikan arah kebijakan, fokus dan kegiatan prioritas sesungguhnya tidak berbeda dengan program. Oleh karena itu, masih bisa dibandingkan antara program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dengan arah kebijakan Kabupaten Jembrana tahun, fokus dan kegiatan prirotas yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007. Selanjutnya arah kebijakan, fokus Kabupaten Jembrana tahun Kabupaten Jembrana tahun dan kegiatan proritas dapat disajikan seperti berikut ini.

1. Percepatan pemerataan, peningkatan aksibilitas dan kualitas pendidikan pra sekolah

2. Percepatan pemerataan, peningkatan aksibilitas dan kualitas pendidikan dasar 9 Percepatan pemerataan, peningkatan aksibilitas dan kualitas pendidikan pra sekolahtahun
3. Rintisan belajar 12 tahun
4. Penurunan buta aksara

3.2.4. Kegiatan RKPD Tahun 2007

RPJMD 2006-2010 merupakan roh dari RKPD 2007. Oleh karena itu seluruh kegiatan dalam RKPD 2007 tidak boleh menyimpang dengan program-program dalam RPJMD 2006-2010. Adapun kegiatan-kegiatan dalam RKPD 2007 di bidang Pendidikan Kabupaten Jembrana seperti berikut ini.

1. Rehabilitasi ruang gedung TK Swasta
2. Unit gedung baru (UBG) TK
3. Rehabilitasi gedung SD(DAK)
4. Meningkatkan kualitas guru TK menjadi D II TK
5. Bantuan dana TK satu atap dengan SD
6. Pengadaan buku paket/buku pelajaran kls I - VI
7. Lomba olahraga usia dini SD
8. Pelaksanaan lomba gugus TK dan SD.
9. Pelaksanaan lomba mata pelajaran, kreatifitas dan aktifitas
10. Tersedianya tenaga TU pada SD Negeri dan TK Negeri
11. Kelengkapan sarana dan prasarana perpustakaan di SD
12. Melaksanakan tes kemampuan dasar dan penilaian mutu

13. Pengadaan computer
14. Ulangan umum SMP/SMA/SMK
15. Pengadaan ruang penunjang lainnya (RPL).
16. Ujian akhir SMP, SMA, SMK.
17. Ujian produktif SMK.
18. Prakenn (PSG)
19. Pemantapan dan try out ujian akhir SMP, SMA dan SMK.
20. Seleksi siswa dan guru berprestasi TK dan SD
21. Pengadaan sarana / alat/media pembelajaran SMP, SMA dan SMK
22. Penyusunan silabus dan lembar kerja siswa SMP, SMA, dan SMK
23. Lomba promosi kompetensi siswa SMK
24. Rehabilitasi gedung dan ruang kelas SMP, SMA, SMK.
25. Pengadaan lab computer
26. Pengadaan guru matematika, bhs inggris, TIK dan guru produktif
27. Pelaksanaan lomba-lomba
28. Diklat Alkapin siswa program keahlian NPL
29. Diklat kedisiplinan siswa SMK
30. Pengembangan bhs inggris.
31. Pemberian subsidi permakanan kpd sekolah unggulan kajian.
32. Lomba mata pelajaran SMP, SMA, SMK
33. Pengadaan ruang kelas baru (RKB)
34. Revitalisasi kegiatan MGNP SMP, SMA, dan SMK.
35. Bantuan transport kepala sekolah SMP, SMA, SMK
36. Transport pengawas SMP, SMA, SMK

37. Diklat penyegaran guru SMP, SMK, SMA
38. Diklat manajemen kepala sekolah SMP, SMA, SMK
39. Penerimaan siswa baru (PSB)
40. Pengadaan sarana Olah raga SMP, SMA, SMK
41. Pemeliharaan SMP, SMA, SMK
42. Penataan halaman sekolah
43. Pekan Olah raga pelajar tingkat kabupaten
44. Pembinaan sekaa teruna
45. Pendidikan keabsahan fungsional (KF Paket A. PBAF)
46. Pemantapan atlet hasil penjaringan
47. Kelompok usaha pemuda produktif (KUPP)
48. Pendidikan Kesetaraan SD Kelas 6 (Paket A setara SD)
49. Pekan olahraga pelajar tingkat provinsi.
50. Pertukaran pemuda antar provinsi(PPAP)
51. Pendidikan kesetaraan SLTP (Paket B)
52. Pengadaan sarana olah raga
53. Pemuda pelopor
54. Pendidikan kesetaraan SMA (paket C)
55. Olah raga tradisional
56. Paskibraka
57. KBU
58. Pembinaan klub olah raga
59. Napak tilas jejak pahlawan
60. Magang bea siswa

61. POPWIL (pekan olah raga pelajar tingkat wilayah regional)
62. Wawasan Wiyata mandala (SLTP SLTA)
63. PKBM.
64. Pelatihan pengurus OSIS KPS (Kelompok pemuda Setaya) untuk pencegahan HIV aids
65. Lomba beleganjur tingkat pelajar SLTP, SLTA
66. Kelompok PAUD
67. Pembinaan pemuda otomotif
68. Penilaian Teruna teruni Bali
69. Posyandu
70. Pengiriman pemuda kapal nusantara
71. Gender

3.2.5. Evaluasi RPJMD Tahun 2006-2010

Dalam melakukan evaluasi terhadap RPJMD 2006-2010 atas dasar RKPD 2007 dengan penekanan evaluasi dari bidang pendidikan akan dilihat dari dua aspek, yakni (1) aspek ketaatasasan atau konsistensi dan (2) aspek kontinuitas. Lebih jelasnya kajian dari dua aspek tersebut diuraikan seperti berikut ini.

3.2.5.1. Aspek Ketaatasasan atau Konsistensi

Sasaran pendidikan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 terdiri dari 15 sasaran, sedangkan sasaran pendidikan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana

tahun 2007 terdiri dari 10 sasaran. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa secara kuantitatif sasaran pendidikan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 telah mencerminkan sasaran pendidikan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010.

Selanjutnya dengan telah tercerminnya sasaran pendidikan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 dengan sasaran pendidikan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010, berarti bahwa telah memenuhi ketaatasasan atau konsistensi. Bahkan lebih jelas dapat dikatakan bahwa RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah menjadi roh RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007.

Bila memperhatikan program bidang pendidikan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana 2006-2010 terdiri dari 10 program sebagaimana tersebut di atas, dan program (arah kebijakan, fokus dan kegiatan prioritas) bidang pendidikan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana 2007 terdiri atas 4 program (arah kebijakan, fokus dan kegiatan prioritas) bidang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa 4 program tersebut telah menjadi bagian dari 10 program RPJMD Kabupaten Jembrana 2006-2010 sehingga telah memenuhi konsistensi.

3.2.5.2. Aspek Kontinuitas

Dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 tertuang 15 sasaran pendidikan dan bila dibandingkan dengan sasaran bidang pendidikan pada RKPD Kabupaten Jembrana 2007, ternyata dilihat

dari aspek kontinuitas telah memiliki keterkaitan sehingga sasaran dalam bidang pendidikan pada RKPD Kabupaten Jemberana 2007 telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran pada RPJMD Kabupaten Jemberana tahun 2006-2010. Artinya sasaran bidang pendidikan pada RKPD tersebut merupakan penjabaran sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Jemberana tahun 2006-2010.

Begitu pula dengan program. Dilihat dari keberlanjutan program bidang pendidikan pada RPJMD Kabupaten Jemberana tahun 2006-2010 dengan program pada RKPD Kabupaten Jemberana 2007 secara substantif memiliki kesamaan esensial sehingga rumusan seluruh program pada RKPD Kabupaten Jemberana 2007 merupakan bagian dan kelanjutan 10 program pada RPJMD Kabupaten Jemberana tahun 2006-2010.

Sementara itu, jika diperhatikan antara program dengan kegiatan-kegiatan pada RKPD Kabupaten Jemberana tahun 2007 ternyata telah memiliki ketaatasasan dan kesinambungan. Hanya saja dalam beberapa kegiatan terdapat tumpang tindih. Artinya jenis kegiatan yang sama muncul lebih dari satu kali, padahal indikator, tolok ukur dan kinerja sama, kendatipun sumber biaya berbeda.

Tumpang tindih tersebut terjadi seperti kegiatan nomor 27 sama dengan kegiatan nomor 7, 8, 9 dan 32. Hal ini bisa menimbulkan penafsiran yang beragam dalam implementasi, sehingga ada semacam kekurangan telitian dalam menjabarkan program menjadi

kegiatan-kegiatan, seperti dalam matrik rencana kerja pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007.

3.3. Bidang Kesehatan.

Suatu negara dengan tingkat kesehatan penduduknya rendah, tentu IPM negara tersebut rendah. Dan penduduk dengan tingkat kesehatan rendah, di samping membawa implikasi terhadap IPM, juga menjadi beban pembangunan. Namun sebaliknya, bila penduduk suatu negara atau wilayah memiliki tingkat kesehatan tinggi, maka menjadi modal dasar dalam pembangunan.

Begitu pula halnya dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Jembrana. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan berbagai kebijakan dan program-program di bidang kesehatan, seperti subsidi biaya kesehatan. Pembangunan kesehatan masyarakat wajib dipandang sebagai investasi. Oleh karena masyarakat yang sehat secara langsung berimplikasi positif terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam kaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana di bidang pembangunan kesehatan masyarakat telah disusun RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dan untuk melihat apakah RPJMD tersebut telah dapat berjalan sebagaimana direncanakan, maka dipandang perlu untuk melakukan evaluasi.

Selanjutnya untuk mengevaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 Kabupaten Jembrana akan dibandingkan dengan

RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007. Dalam membandingkan antara RPJMD dengan RKPD tersebut akan dilihat dari dua aspek, yakni sasaran dan program. Lebih jelasnya kedua aspek tersebut diuraikan seperti berikut ini.

3.3.1. Sasaran Kesehatan RPJMD Tahun 2006-2010

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana di bidang kesehatan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 sasaran bidang kesehatan diformulasikan sebanyak 4 (empat) sasaran dan lebih jelasnya disajikan seperti berikut ini.

1. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.
2. Menurunnya angka kematian bayi di masyarakat
3. Menurunnya angka kematian ibu
4. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita

Sementara itu, sasaran bidang kesehatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 telah diformulasikan sebanyak 4 (empat sasaran). Lebih jelasnya seperti berikut ini.

1. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat dari 71,34 tahun 2005, 71,40 prediksi tahun 2006 menjadi 71,50 pada tahun 2007.
2. Menurunnya angka kematian bayi dimasyarakat dari 10,11 tahun 2005, 9,10 prediksi tahun 2006 menjadi 8,00 tahun 2007.
3. Menurunnya angka kematian ibu dari 129,67 tahun 2005, 110 prediksi tahun 2006 menjadi 100 tahun 2007.

4. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita dari 4,38 tahun 2005, 3,99 prediksi tahun 2006 menjadi 3,61 pada tahun 2007.

3.3.2. Program Kesehatan RPJMD Tahun 2006-2010.

Dalam RPJMD 2006-2010 telah dirumuskan 3 (tiga) program pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Jembrana. Ketiga program tersebut adalah seperti berikut ini.

1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
2. Program lingkungan sehat
3. Program upaya kesehatan masyarakat

3.3.3. Program Kesehatan RKPD Tahun 2007.

Sebagaimana dengan bidang pendidikan, program kesehatan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 tidak tercantum secara eksplisit, namun untuk dapat melakukan evaluasi program tersebut diambil dari arah kebijakan, fokus dan kegiatan prioritas yang secara implisit mencerminkan program kesehatan.

Lebih jelasnya berikut ini disajikan arah kebijakan, fokus dan kegiatan prioritas dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 seperti dibawah ini.

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis
2. Pengembangan jaminan kesehatan Jembrana bagi masyarakat

3. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat
4. Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini
5. Pemerataan dan peningkatan kualitas kesehatan dasar pada masyarakat.

3.3.4. Kegiatan Kesehatan Pada RKPD Tahun 2007

RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 merupakan roh dari RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007. Oleh karena itu seluruh kegiatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 tidak boleh menyimpang dengan program-program dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Adapun kegiatan-kegiatan bidang kesehatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 seperti berikut ini.

1. Pencegahan dan penanggulangan DBD
2. Peningkatan usaha kesehatan sekolah/UKS/UKGS
3. Pelayanan kesehatan perorangan (JKJ)
4. Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
5. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAK NON DR)
6. Administrasi dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAK NON DR)

7. Peningkatan kesehatan Posyandu
8. Pelayanan kesehatan Ibu
9. Pencegahan dan penganggulangan malaria
10. Peningkatan gizi masyarakat
11. Peningkatan perilaku bersih dan sehat (THBS)
12. Gerakan sayang ibu (GSI)
13. Pelayanan kesehatan anak
14. Peningkatan promosi kesehatan (PROMKES)
15. Pencegahan dan penanggulangan TBC
16. Peningkatan kesehatan Usila
17. Pelayanan kesehatan penunjang
18. Peningkatan usaha kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)
19. Pengawasan kualitas air dan lingkungan
20. Peningkatan tanaman obat keluarga (TOGA)
21. Pelayanan kesehatan masyarakat
22. Pencegahan penyakit (Imunisasi)
23. Pelayanan kesehatan reproduksi
24. Penyehatan lingkungan pemukiman
25. Pelayanan kesehatan rujukan
26. Pengelolaan obat dan rumah tangga (UPT GUDANG FRAMASI)
27. Pelayanan kesehatan matra
28. Pelayanan kesehatan remaja

29. Penyehatan makanan dan minuman
30. Pencegahan penyakit tidak menular
31. Penyehatan tempat-tempat umum (TTU)
32. Peningkatan saka bakti husada (SBH)
33. Perawatan kesehatan masyarakat
34. Peningkatan kesehatan tradisional (BATTRA)
35. Pelayanan kesehatan jiwa
36. Pencegahan dan penanggulangan ISPA/Flu Burung
37. Pelayanan kesehatan kerja
38. Pengamatan penyakit dan sistem kewaspadaan dini (PP-SKD)
39. Pencegahan dan penanggulangan NAFZE
40. Pengawasan industri rumah tangga pangan (IRTP)
41. Pengadaan alat medis, penunjang medis dan non medis
42. Pencegahan dan penanggulangan penyakit diare
43. Pencegahan dan penanggulangan Vilanasias
44. Pencegahan dan penanggulangan Taesiasis
45. Pencegahan dan penanggulangan Rabies
46. Pencegahan dan penanggulangan kusta
47. Pelayanan kesehatan olahraga dan kebugaran jasmani
48. Pengembangan hukum kesehatan

3.3.5. Evaluasi Pada RPJMD Tahun 2006-2010

Dalam melakukan evaluasi terhadap RPJMD 2006-2010 atas dasar RKPD 2007 dengan penekanan evaluasi dari bidang kesehatan juga dilihat dari dua aspek. Kedua aspek tersebut meliputi ; (1) aspek ketaatasasan atau konsistensi dan (2) aspek kontinuitas. Lebih jelasnya kajian dari dua aspek tersebut diuraikan seperti berikut ini.

3.3.5.1. Aspek Ketaatasasan atau Konsistensi

Sasaran bidang kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 terdiri dari 4 sasaran. Sementara itu, dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 terdiri dari 4 sasaran. Bila diperhatikan dari aspek kuantitas, maka sasaran bidang kesehatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 tersebut telah sesuai bila dibandingkan dengan sasaran bidang kesehatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Kondisi seperti itu merupakan suatu kewajaran secara hirarkhis karena RKPD merupakan turunan dari RPJMD.

Adanya kondisi seperti tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa dilihat dari aspek sasaran bidang kesehatan, ternyata RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 sudah sepenuhnya mengacu pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Oleh karena itu telah memenuhi ketidaktaatasasan.

Dilihat dari aspek program pembangunan bidang kesehatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010

terdiri dari 3 program sebagaimana tersebut di atas dan program bidang kesehatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 terdiri dari 5 program, maka dapat dinyatakan bahwa secara kuantitatif program bidang kesehatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 telah melampaui program bidang kesehatan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Hal itu menunjukkan secara yuridis telah memenuhi asas kepatutan.

3.3.5.2. Aspek Kontinuitas

Sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 di bidang kesehatan, dibandingkan dengan sasaran bidang kesehatan yang teruang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007, ternyata telah memiliki hubungan dan relevansi yang signifikan.

Secara implisit dan eksplisit sasaran bidang kesehatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran bidang kesehatan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010.

Begitu pula dilihat dari aspek program bahwa RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 sebagai turunan dari RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010, ternyata menunjukkan bahwa program-program di bidang kesehatan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun Kabupaten Jembrana tahun 2007 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan juga dengan program-program kesehatan sebagaimana yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Hal itu menandakan bahwa telah terjadi kontinuitas atau keberlanjutan baik secara hirarkhis maupun secara yuridis.

Begitu pula bila memperhatikan seluruh kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam matrik RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007, ternyata secara komprehensif telah sejalan dengan program bidang kesehatan pada RPKD Kabupaten Jembrana tahun 2007. Atau secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan bidang kesehatan yang telah dirumuskan dalam matrik RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 telah merupakan penjabaran dari program bidang kesehatan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007.

3.4. Bidang Daya Beli

Masalah sosial memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat, maka semakin tinggi intensitas masalah sosial dalam masyarakat.

Begitu pula sebaliknya, jika tingkat kesejahteraan masyarakat relatif baik, maka cenderung masalah sosial dan penyakit sosial relatif kecil tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Suatu daerah dengan tingkat kesejahteraan penduduknya rendah, tentu IPM daerah tersebut rendah pula.

Dan penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah, di samping membawa implikasi terhadap IPM, juga menjadi beban bagi suatu daerah dalam pembangunan. Namun, bila penduduk suatu daerah dengan tingkat kesejahteraan tinggi, maka penduduk tersebut dapat menjadi pendorong pembangunan dalam segala bidang, termasuk pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan suatu potensi dan secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat.

Begitu pula dengan harapan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan berbagai kebijakan dan program-program di bidang peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan daya beli, seperti menyalurkan batuan dana bergulir dan melakukan revitalisasi di bidang pertanian. Dalam kaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana tersebut telah disusun RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dan untuk melihat apakah RPJMD tersebut telah dapat berjalan sebagaimana direncanakan, maka dipandang perlu untuk melakukan evaluasi.

Selanjutnya untuk mengevaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010, terutama di bidang daya beli akan dibandingkan dengan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007. Dalam membandingkan antara RPJMD dengan RKPD tersebut akan dilihat dari dua aspek, yakni sasaran dan program. Lebih jelasnya kedua aspek tersebut diuraikan seperti berikut ini.

3.4.1. Sasaran Pada RPJMD Tahun 2006-2010.

Terdapat 3 bidang sasaran pada Kabupaten Jember tahun RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010. Ketiga bidang tersebut adalah seperti berikut ini.

a. Revitalisasi Pertanian

1. Terjaganya kemantapan ketersediaan beras dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan sawah.
2. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.
3. Difersifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam dengan gizi berimbang untuk menurunkan ketergantungan pada beras.
4. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian
5. Meningkatnya produksi perdagangan hasil pertanian

b. Pemberdayaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

1. Meningkatnya kualitas POKMAS, Lembaga Usaha dan Perkreditan Desa.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelembagaan, serta peran serta koperasi dan UKM dalam perekonomian daerah.
3. Meningkatnya peran dan kegiatan agro industri.

4. Berkembangnya kegiatan bisnis dan agrobisnis, keunggulan daerah.
 5. Berkembang dan terciptanya iklim investasi
 6. Terserapnya tenaga kerja di sektor riil
 7. Meningkatkan nilai ekspor hasil industri dan KUKM
- c. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dengan satu sasaran yaitu :
Menurunnya tingkat pengangguran.

Selanjutnya sasaran dalam bidang peningkatan daya beli masyarakat pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 telah diformulasikan dalam 3 bidang sasaran dan dirumuskan menjadi 11 (sebelas) sasaran. Lebih jelasnya seperti berikut ini.

a. Bidang Revitalisasi Pertanian

1. Terjaganya kemantapan ketersediaan beras dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian dalam arti luas.
2. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.
3. Diversifikasi produksi ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam dengan gizi berimbang untuk menurunkan ketergantungan pada beras.

b. Bidang Pemberdayaan Perindagkop, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

1. Meningkatkan kualitas Kopmas, lembaga usaha dan perkreditan desa
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan serta peran koperasi dan UKM dalam perekonomian daerah
3. Meningkatnya jumlah unit usaha
4. Berkembangnya dan terciptanya investasi.
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
6. Realisasi eksport Kabupaten Jembrana
7. Peningkatan daya beli masyarakat merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berbasis pertanian hutan, menunjang industri dan pariwisata. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi ditempuh dengan menciptakan lingkungan usaha yang sehat untuk meningkatkan peranan masyarakat.

c. Perbaikan Ketenagakerjaan

1. Menurunnya tingkat pengangguran

3.4.2. Program Daya Beli Pada RPJMD Tahun 2006-2010.

Dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah dirumuskan 4 (empat) program pembangunan bidang peningkatan daya beli. Keempat program tersebut adalah seperti berikut ini.

1. Peningkatan mutu dan jumlah produk pertanian
2. Program peningkatan penghasilan (pendapatan)
3. Program proteksi pertanian
4. Pembinaan KK miskin khususnya petani dan nelayan kecil

3.4.3. Program Daya Beli Pada RKPD tahun 2007.

Pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 secara eksplisit tidak dirumuskan program bidang daya beli. Hanya saja program bidang daya beli secara implisit masuk dalam arah kebijakan, fokus dan kegiatan prioritas.

Arah kebijakan, fokus dan kegiatan prioritas dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 dapat disajikan seperti berikut ini.

a. Revitalisasi Pertanian

1. Mempertahankan tingkat produksi beras di Kabupaten Jembrana dengan ketersediaan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, kebijakan diarahkan dengan melakukan pengamanan lahan sawah di daerah irigasi berproduktivitas tinggi agar kemandirian pangan daerah mendukung ketahanan pangan nasional dapat diamankan.
2. Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras diarahkan dengan melakukan dengan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat melalui kerjasama dengan industri pangan untuk meningkatkan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif.

- b. Pemberdayaan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - 1. Peningkatan mutu dan hasil industri
 - 2. Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.
 - 3. Pemberdayaan koperasi pengusaha kecil dan menengah
 - 4. Mengembangkan hubungan kemitraan antara pelaku dengan lembaga keuangan dan ekonomi desa/daerah.
 - 5. Meningkatkan daya saing industri perdagangan dan investasi
 - 6. Menciptakan iklim organisasi yang kondusif
- c. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan
 - 1. Menciptakan lapangan kerja dengan produktivitas dari 17 orang tahun 2005, 45 prediksi tahun 2006 menjadi 60 orang tahun 2007.

3.4.4. Kegiatan Bidang Peningkatan Daya Beli Pada RKPD Tahun 2007

RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 merupakan landasan dasar dari RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007. Oleh karena itu seluruh kegiatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 tidak boleh menyimpang dengan program-program yang telah tertuang pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Adapun kegiatan-kegiatan bidang peningkatan daya beli dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 di Kabupaten Jembrana seperti berikut ini.

1. Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pemberian dana talangan, dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan (DPM-LUEP).
2. Operasional dewan ketahanan pangan (DKP) Kabupaten Jemberana.
3. Pengembangan kawasan penggunaan pupuk organik berbasis padi.
4. Pembebanan subsidi pupuk lengkap NPK (PHONSKA)
5. Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES) dan pembuatan embung (DAK).
6. Pengembangan sentra komoditas kedelai (DTP).
7. Pengadaan bibit ortikultura (durian dan manggis).
8. Pembinaan dan penyediaan produksi beras lokal bertabel (DTP).
9. Pengembangan sentra agribisnis komoditas pisang (DTP).
10. Pembinaan industri komoditas tanaman pangan (TP) (DTP)
11. Pembinaan agroindustri komoditas hortikultura (HORTI) (DTP)
12. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan (MONEVOR) pestisida, pupuk dan harga pasar.
13. Pembuatan analisa usaha tani dan statistik tanaman pangan serta hortikultura.
14. Pemberdayaan kelompok tani pisang (SLPHT).

15. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan (MONEVOR) petani nelayan kecil (PNK/P4K).
16. Pekan nasional kelompok KTNA tingkat nasional di Kabupaten Banyuasin Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
17. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan (MONEVOR) bantuan langsung masyarakat (BLM) dan dana bergulir.
18. Penyusunan program penyuluhan pertanian.
19. Pengamanan kesehatan hewan.
20. Pelayanan kegiatan inseninasi buatan.
21. Data potensi peternakan.
22. Operasi terpadu pengawasan pemotongan sapi betina produktif dan peredaran daging.
23. Pengukuran statistik vital babi
24. Penyebaran dan pengemabangan hijauan makanan ternak (HNT).
25. Penataan ternak pemerintah.
26. Penjaringan bibit sapi unggul.
27. Pengolahan pakan ternak berbasis bahan baku lokal.
28. Pengolahan lahan dan air.
29. Pengendalian wabah AI.
30. Pengembangan agribisnis sapi potong dan pengolahan limbah.

31. Pengembangan kegiatan pasar hewan melalui pola executing.
32. Pengolahan pasca panen produk hewan.
33. Pengembangan integrasi ternak pada lahan perkebunan.
34. Pengembangan sentra ayam buras telur (executing).
35. Bursa ternak sapi potong.
36. Pengembangan agribisnis peternakan.
37. Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
38. Pengembangan sentra bibit babi.
39. Pusat pembibitan sapi pedesaan (VILAGE BRANDING CENTRE)
40. Pembinaan kelompok ternak.
41. Pengembangan ekonomi masyarakat miskin.
42. Temu usaha peternakan
43. Studi banding/magang
44. Pemberdayaan klasifikasi kelas kemampuan kelompok.
45. Pembinaan kelembagaan peternakan.
46. Operasi terpadu.
47. Penanggulangan gangguan keamanan hutan Bali barat.
48. Pemeriksaan perijinan penebangan kayu rakyat (IPKN).
49. Pengukuran dan pengujian barang kayu temuan serta lelang.
50. Puncak penghijauan dan konservasi alam nasional serta pemeliharannya.

51. Budidaya tanaman obat-obatan di hutan produksi kayu perpatungan.
52. Bantuan operasional pengamanan hutan pada desa.
53. Gerakan rehabilitasi hutan dan lahan GNRHL/GERHAN.
54. Pengadaan sarana pengolahan.
55. Ekstensifikasi/difersivikasi kakao.
56. Konserfasi lahan.
57. Pengendalian hama/penyakit (OPT).
58. Pemeliharaan kebun contoh.
59. Penyusunan rancangan teknis pengkajian pendapatan tani berbasis komoditi unggulan.
60. Pengembangan sentra vanili.
61. Intensifikasi kakao.
62. Replanting kakao.
63. Pengembangan KIMBUN.
64. Pengembangan pengelolaan air.
65. SL-PHT dan UBA.
66. Pengembangan intensifikasi budidaya ikan air tawar.
67. Pengembangan budidaya air payau.
68. Rehabilitasi bangunan BDI tegak gede (DAK).
69. Bantuan operasional BDI tegak gede.
70. Pengadaan fasilitas laboratorium penguji dan pengendali mutu hasil perikanan (LPPMHP-DAK).
71. Pendataan informasi pasar perikanan dan kelautan.

72. Pengadaan sarana operasional doking kapal ikan (DAK).
73. Pengadaan sarana dan prasarana TPI pengambengan.
74. Pengumpulan data statistik perikanan dan kelautan.
75. Pengendalian hama penyakit ikan.
76. Bantuan pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
77. Pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan.
78. Penumbuhan POKMASWAS.
79. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang.
80. Rehabilitasi sarana jaringan irigasi tambak.
81. Budidaya tambak berwawasan lingkungan.
82. pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP).
83. Perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan APBD 2 yang bersumber dari DAU/DAK/PAD dan DANA.
84. Pembentukan sentra industri
85. Pemberdayaan Dekranasda Kabupaten Jembrana
86. Pengembangan industri pengolahan kakao
87. Pengembangan industri pengolahan daging
88. Pengembangan industri pengolahan kelapa terpadu
89. Pengembangan industri pengolahan buah-buahan
90. Pengembangan desain kemasan prodak industri pangan
91. Pembatan CD katalog industri unggulan produk Jembrana
92. Penyusunan Booklet produk unggulan Jembrana

93. Uji mutu produk industri pangan
94. Pengkajian teknologi pemanfaat limbah air megumi
95. Pusat informasi produksi Jembrana di Denpasar
96. Sosialisasi dan promosi dalam rangka pemasaran produk
97. Pengawasan terhadap penjualan dan peredaran barang di pasar serta minyak tanah
98. Perlindungan konsumen (pengawasan terhadap penjualan peredaran minuman beralkohol)
99. Pelaksanaan pengawasan dan tera ulang takaran timbangan dan perlengkapannya
100. Pengumpulan, pengolahan dan penyiaran harga melalui radio
101. Bisnis center
102. Pameran produk ekspor (PPE)
103. Pasar seni rest area yeh embang
104. Pemberdayaan koperasi melalui peningkatan kelembagaan dan usaha.
105. Peningkatan partisipasi anggota masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan KUKM
106. Pengendalian dan pemantauan dana bergulir KUT dan usaha koperasi
107. Pemerdayaan dan perkuatan usaha koperasi Bali
108. Pengembangan kewirausahaan daya saing dan sistem pendukung KUKM Bali Kabupaten Jembrana

109. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil
110. Bantuan langsung masyarakat (BLM)
111. Meningkatkan kesehatan usaha LPD
112. Meningkatkan peran LPM
113. Pembinaan kelompok P2W-KSS
114. Peningkatan pemantapan klasifikasi posyandu
115. Terlaksananya bulan bakti masyarakat
116. Penyaluran dan pengembalian dana bergulir
117. Meningkatkan akses masyarakat dengan TTG
118. Meningkatkan klasifikasi Pokmas
119. Percepatan penumbuhkembangan BUMDES
120. Pembinaan secara terpadu kepada KK miskin
121. Pembinaan usaha ekonomi desa (UED)
122. Melaksanakan pemantauan dan penanganan pengaduan
PKPS-BBM
123. Koordinasi penyuluhan dan penanganan pengaduan raskin
124. Memberikan makanan tambahan untuk anak sekolah (PMT-
AS)
125. Kemitraan bagi pengembangan lokal
126. Pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima disekitar
taman pecangakan
127. Mempromosikan LPD lewat radio
128. Bimbingan teknis pengurus LPD

3.4.5. Evaluasi RPJMD Pada 2006-2010 Atas Dasar RKPD Tahun 2007

Dalam melakukan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 atas dasar RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 dengan penekanan evaluasi dari bidang peningkatan daya beli juga dilihat dari dua aspek. Kedua aspek tersebut meliputi ; (1) aspek ketaatasasan atau konsistensi dan (2) aspek kontinuitas. Lebih jelasnya kajian dari dua aspek tersebut diuraikan seperti berikut ini.

3.4.5.1. Aspek Ketaatasasan atau Konsistensi

Sasaran pembangunan peningkatan daya beli masyarakat dalam RPJMD 2006-2010 Kabupaten Jembrana terdiri dari 13 sasaran. Sementara itu, dalam RKPD 2007 Kabupaten Jembrana terdiri dari 11 sasaran. Bila diperhatikan dari aspek kuantitas, maka sasaran bidang peningkatan daya beli dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 tersebut lebih kecil dengan sasaran bidang peningkatan daya beli yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010, namun kendatipun lebih kecil tetap mengacu kepada RPJMD.

Kondisi seperti tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa dilihat dari aspek sasaran bidang peningkatan daya beli, ternyata RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 sudah sepenuhnya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Sehingga telah memenuhi ketaatasasan.

Memperhatikan aspek program pembangunan bidang peningkatan daya beli yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010 terdiri dari 13 program sebagaimana tersebut di atas dan program bidang peningkatan daya beli yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jember tahun 2007 terdiri dari 11 program, maka dapat dinyatakan bahwa secara substantif telah memenuhi ketaatan.

Selanjutnya memperhatikan antara program dengan kegiatan, ternyata telah memiliki kesesuaian atau konsistensi. Artinya dari 11 program bidang peningkatan daya beli telah menjadi dasar pijakan dalam penyusunan kegiatan sebanyak 128 kegiatan dan bila dicermati 11 program dan 128 kegiatan tersebut telah memenuhi konsistensi, sehingga program telah menjiwai dan meliputi seluruh kegiatan yang disajikan dalam matrik kegiatan bidang peningkatan daya beli pada RKPD Kabupaten Jember tahun 2007.

3.4.5.2. Aspek Kontinuitas

Memperhatikan sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010 di bidang peningkatan daya beli sebanyak 13, dibandingkan dengan sasaran bidang peningkatan daya beli yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Jember tahun 2007 sebanyak 11, ternyata telah memiliki hubungan dan relevansi yang signifikan. Kendatipun sasaran dalam RKPD Kabupaten Jember tahun 2007 lebih kecil dibandingkan RPJMD Kabupaten Jember

tahun 2006-2010 namun tetap memiliki keterkaitan. Secara implisit dan eksplisit sasaran bidang peningkatan daya beli dalam RKPD Kabupaten Jember tahun 2007 telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran bidang peningkatan daya beli pada RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010

Begitu pula dilihat dari aspek program bahwa RKPD Kabupaten Jember tahun 2007 sebagai turunan dari RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010, ternyata menunjukkan bahwa program-program di bidang peningkatan daya beli pada RKPD Kabupaten Jember tahun 2007 merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dengan program-program peningkatan daya beli sebagaimana yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010. Hal itu menandakan bahwa telah terjadi kontinuitas atau keberlanjutan baik secara hirarkhis maupun secara yuridis antara RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010 dengan RKPD Kabupaten Jember tahun 2007 di bidang peningkatan daya beli.

Selanjutnya memperhatikan seluruh kegiatan di bidang peningkatan daya beli sebagaimana tercantum dalam matrik RKPD Kabupaten Jember tahun 2007, ternyata secara komprehensif telah sejalan dengan program bidang peningkatan daya beli pada RPKD Kabupaten Jember tahun 2007. Hanya saja yang perlu dicatat bahwa didalam matrik rencana kerja belum dijabarkan satu kegiatan yakni program ketenagakerjaan.

3.5. Epilog

Hasil evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 atas dasar RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007, ternyata secara umum RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah menjiwai, meliputi dan telah dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam menyusun RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007.

Begitu pula dengan program-program yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010, telah menjadi dasar pijakan dan acuan pokok dalam menyusun program-program pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007. Sehingga seluruh program pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 telah memenuhi asas konsistensi dan kontinuitas.

Selanjutnya ditinjau dari aspek hubungan atau keterkaitan antara program-program dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 dengan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam matrik pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007, ternyata telah pula mengikuti asas kepatutan dan ketaatasasan.

BAB IV EVALUASI RPJMD 2006-2010 ATAS DASAR RKPD 2008

4.1. Prolog.

Setelah melakukan evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 atas dasar RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 dan 2007, maka pada Bab ini akan dilanjutkan dengan mengkaji atas dasar RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan dan bertujuan untuk mencapai perbaikan kehidupan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut dibutuhkan berbagai macam pendekatan dan strategi, baik dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Salah satu strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat kabupaten/kota adalah merumuskan RPJMD dan dari RPJMD itu diteruskan menjadi tahapan-tahapan tahunan dan disebut dengan RKPD.

Prinsipnya penyusunan RKPD tidak boleh bertentangan dengan RPJMD. Begitu pula dengan RKPD yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 Kabupaten Jembrana merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 Kabupaten Jembrana.

Penyusunan RKPD tersebut dimaksudkan untuk lebih memperjelas dan mempermudah arah serta pelaksanaan program-program pembangunan sehingga tepat sasaran dan mempermudah dalam melakukan pengawasan sehingga memperkecil kemungkinan

penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan dengan dilakukan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 Kabupaten Jembrana ini, ditekankan pada tiga bidang, yakni (1) bidang pendidikan, (2) bidang kesehatan dan (3) bidang daya beli. Selanjutnya evaluasi tersebut dapat digambarkan seperti pada uraian berikut ini.

4.2. Bidang Pendidikan.

Salah satu modal dasar pembangunan adalah penduduk. Ungkapan tersebut menjadi benar, bilamana penduduk suatu daerah tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Namun sebaliknya, jika penduduk tersebut sebagian besar tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam pembangunan, tentu menjadi beban pembangunan dan bukan modal pembangunan. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dapat diukur dari tingkat pendidikan masyarakat.

Begitu pula halnya dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Jembrana. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan berbagai kebijakan dan program-program di bidang pendidikan, seperti subsidi pendidikan dalam bentuk pembebasan iuran pendidikan terhadap siswa-siswa yang bersekolah di sekolah negeri. Selanjutnya dalam melakukan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dibandingkan dengan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008.

Selanjutnya untuk membandingkan antara RPJMD dengan RKPD tersebut di atas akan dilihat dari tiga aspek. Ketiga aspek tersebut meliputi sasaran, program dan kegiatan. Lebih jelasnya ketiga aspek tersebut diuraikan seperti berikut ini.

4.2.1. Sasaran Pendidikan Pada RPJMD Tahun 2006-2010

Sasaran umum kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana di bidang pendidikan adalah peningkatan kualitas masyarakat. Dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 sasaran bidang pendidikan diformulasikan sebanyak 15 (limabelas) sasaran dan lebih jelasnya disajikan seperti berikut ini.

1. Menurunnya secara berarti jumlah penduduk berusia 15 ke atas yang buta huruf.
2. Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun.
3. Meningkatnya APK dan APM.
4. Angka DO yang terus menurun.
5. Lama belajar rata-rata di atas 7 tahun.
6. Relevansi lulusan dengan lapangan kerja mencapai 75 %
7. Pendidikan dasar sembilan tahun yang antara lain diukur dengan Wajib Belajar.
8. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini.

9. Meningkatnya proporsi penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
10. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/SMP/SMPLB ke jenjang pendidikan menengah.
11. Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan dengan menurunnya angka mengulang kelas.
12. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat termasuk antara penduduk perkotaan dan pedesaan serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.
13. Meningkatnya proporsi pendidikan formal dan non formal memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar yang disesuaikan pula dengan perkembangan jumlah peserta didik.
14. Meningkatnya kualitas hasil belajar yang diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar.
15. Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat.

Sementara itu, sasaran bidang pendidikan dalam RKPD Kabupaten Jember tahun 2008 telah diformulasikan seperti berikut ini.

1. Meningkatnya anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini.
2. Meningkatnya APK SD, SMP, dan SMA.
3. Penurunan angka DO

4. Meningkatnya relevansi kelulusan dengan lapangan kerja.
5. Menurunnya jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas.
6. Meningkatnya proporsi penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
7. Meningkatnya angka melanjutkan sekolah dari lulusan SMP/MTs /SMPLB kejenjang pendidikan menengah.
8. Meningkatnya kualitas hasil belajar yang diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar.

4.2.2. Program Pada RPJMD Tahun 2006-2010.

Dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010 telah dirumuskan 10 (sepuluh) program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Jember. Kesepuluh program tersebut adalah seperti berikut ini.

1. Program pendidikan usia dini
2. Program wajib belajar pendidikan 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun
3. Peningkatan mutu tenaga pendidikan
4. Peningkatan sarana dan prasarana dengan pola block grant
5. Sekolah kajian
6. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
7. Program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda
8. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
9. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

10. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

4.2.3. Program Pada RKPD Tahun 2008.

Kegiatan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 telah pula dirumuskan program pembangunan bidang pendidikan. Terdapat 6 program yang telah tersusun seperti berikut ini.

1. Program pendidikan usia dini
2. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
3. Program pendidikan menengah
4. Program pendidikan non formal
5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan
6. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

4.2.4. Kegiatan Pada RKPD Tahun 2008

RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 merupakan roh dari RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008. Oleh karena itu seluruh kegiatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 tidak boleh menyimpang dengan program-program dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Adapun 37 jenis kegiatan-kegiatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 seperti berikut ini.

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
 - e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - k. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - l. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - m. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Rehab/Sedang Berat Gedung Kantor
3. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- a. Rehab sedang/berat bangunan sekolah
 - b. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini
4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- a. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 - b. Pengadaan Mebeluer Sekolah
 - c. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

- d. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah
 - e. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan sekolah
 - f. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
 - g. Penyediaan Dana pengembangan sekolah untuk SD/MI, SMP/MTs
 - h. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
5. Program Pendidikan Menengah
- a. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 - b. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - c. Pengadaan Mebeluer Sekolah
 - d. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - e. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
 - f. Pelatihan Penyusunan Kurikulum
 - g. Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan
 - h. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
 - i. Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Keluarga Tidak Mampu
 - j. Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri
 - k. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah
6. Program Pendidikan Non Formal
- a. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
 - b. Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
 - c. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan

bagi pendidik dan tenaga kependidikan

4.2.5. Evaluasi Pada RPJMD Tahun 2006-2010

Dalam melakukan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 atas dasar RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 dengan penekanan evaluasi dari bidang pendidikan akan dilihat dari dua aspek, yakni (1) aspek ketaatasasan atau konsistensi dan (2) aspek kontinuitas. Lebih jelasnya kajian dari dua aspek tersebut diuraikan seperti berikut ini.

4.2.5.1. Aspek Ketaatasasan atau Konsistensi

Memperhatikan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 terdiri dari 15 sasaran sebagaimana tersebut di atas dan sasaran bidang pendidikan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 terdiri dari 8 sasaran, maka dapat dinyatakan bahwa secara kuantitatif sasaran bidang pendidikan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 telah mendekati pencapaian sasaran bidang pendidikan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010.

Selanjutnya jika dilihat dari aspek materi, ternyata kondisi seperti tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa dilihat dari aspek sasaran bidang pendidikan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 sudah sepenuhnya mengacu pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-

2010. Oleh karena itu terdapat ketaatasasan dan konsistensi dalam penyusunan RKPD tersebut.

Bila memperhatikan program pembangunan bidang pendidikan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 terdiri dari 10 program sebagaimana tersebut di atas dan program bidang pendidikan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 terdiri dari 6 program, maka dapat dinyatakan bahwa secara nyata program bidang pendidikan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 telah merupakan bagian dari program bidang pendidikan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010.

Kondisi seperti tersebut di atas, menunjukkan bahwa program bidang pendidikan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 sepenuhnya telah memenuhi ketaatasasan dengan RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010.

Sementara itu, hasil evaluasi antara program-program pendidikan yang tercantum RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008, dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang telah dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 telah sesuai dan memenuhi ketaatasasan. Oleh karena seluruh kegiatan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan merupakan bagian-bagian dari program yang telah diformulasikan.

4.2.5.2. Aspek Kontinuitas

Secara umum sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 di bidang pendidikan, dibandingkan sasaran bidang pendidikan yang teruang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 ternyata memiliki hubungan dan relevansi yang signifikan. Begitu pula dilihat dari aspek program bahwa RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 sebagai turunan dari RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010, ternyata menunjukkan bahwa program-program di bidang pendidikan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan program-program pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Hal itu menandakan bahwa telah terjadi kontinuitas atau keberlanjutan secara heirarkhis antara RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dengan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Selanjutnya, memperhatikan seluruh kegiatan pendidikan yang tercantum dalam matrik RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008, ternyata secara umum telah sejalan dengan program bidang pendidikan dalam RPKD Kabupaten Jembrana tahun 2008. Atau secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang telah dirumuskan dalam matrik RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 tersebut merupakan turunan dari program bidang pendidikan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008. Namun pada matrik kegiatan tersebut

terdapat program pelayanan administrasi perkantoran yang tidak dirumuskan dalam program pendidikan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008. Padahal dilihat dari indikator, tolok ukur kinerja, target kinerja sama dari segi sumber biaya berbeda.

4.3. Bidang Kesehatan.

Tingkat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM). Suatu negara dengan tingkat kesehatan penduduknya rendah, tentu IPM negara tersebut rendah. Dan penduduk dengan tingkat kesehatan rendah, di samping membawa implikasi terhadap IPM, juga menjadi beban pembangunan. Namun sebaliknya, bila penduduk suatu negara atau wilayah memiliki tingkat kesehatan tinggi, maka menjadi modal dasar dalam pembangunan.

Suatu daerah yang berhasil dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dapat pula diukur dari tingkat kesehatan masyarakat. Begitu pula halnya dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Jembrana. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan berbagai kebijakan dan program-program di bidang kesehatan, seperti subsidi biaya kesehatan.

Pembangunan kesehatan masyarakat wajib dipandang sebagai investasi. Oleh karena masyarakat yang sehat secara langsung berimplikasi positif terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam kaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana di bidang pembangunan kesehatan masyarakat telah disusun RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dan untuk melihat apakah RPJMD tersebut telah dapat berjalan sebagaimana direncanakan, maka dipandang perlu untuk melakukan evaluasi. Selanjutnya untuk mengevaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 Kabupaten Jembrana akan dibandingkan dengan RKPD 2008. Dalam membandingkan antara RPJMD dengan RKPD tersebut akan dilihat dari tiga aspek, yakni sasaran, program dan kegiatan. Lebih jelasnya ketiga aspek tersebut diuraikan seperti berikut ini.

4.3.1. Sasaran Kesehatan Pada RPJMD 2006-2010

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana di bidang kesehatan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program kesehatan pada RPJMD 2006-2010 sasaran bidang kesehatan diformulasikan sebanyak 4 (empat) sasaran dan lebih jelasnya disajikan seperti berikut ini.

1. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.
2. Menurunnya angka kematian bayi di masyarakat
3. Menurunnya angka kematian ibu
4. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita

Sementara itu, sasaran bidang kesehatan dalam RKPD 2008 Kabupaten Jembrana. telah diformulasikan sebanyak 6 (enam sasaran). Lebih jelasnya seperti berikut ini.

1. Meningkatnya umur harapan hidup.
2. Menurunnya angka kematian bayi per 100.000 kelahiran di masyarakat.
3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.
4. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak dan balita.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
6. Tersusunnya sistem perlindungan sosial.

4.3.2. Program Kesehatan RPJMD Tahun 2006-2010.

Dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010 telah dirumuskan 3 (tiga) program pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Jember. Ketiga program tersebut adalah seperti berikut ini.

1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
2. Program lingkungan sehat
3. Program upaya kesehatan masyarakat

4.3.3. Program Kesehatan RKPD Tahun 2008.

Pada RKPD Kabupaten Jember tahun 2008 telah pula dirumuskan program pembangunan bidang kesehatan. Terdapat duabelas program yang telah tersusun seperti berikut ini.

1. Program upaya kesehatan masyarakat.
2. Program Pengawasan Obat dan Makanan

3. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia.
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Program Perbaikan ijin Masyarakat.
6. Program pengembangan lingkungan sehat.
7. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular.
8. Program Standarisasi Pelayanan kesehatan (KW SPM).
9. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
10. Program Peningkatan Pelayanan Lansia.
11. Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit.
12. Program Pengembangan Rumah Sakit.

4.3.4. Kegiatan Bidang Kesehatan Pada RKPD Tahun 2008

RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 merupakan roh dari RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008. Oleh karena itu seluruh kegiatan dalam RKPD 2008 tidak boleh menyimpang dengan program-program dalam RPJMD 2006-2010. Adapun kegiatan-kegiatan bidang kesehatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 seperti berikut ini.

1. Program Pelayanan Administrasi Kantor
 - a. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
 - f. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - g. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - h. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah jabatan
 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kerja
 - b. Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja
 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
 - c. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
 - d. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan
 - b. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik Esensial
 - c. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

- d. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
7. Program Pengawasan Obat dan Makanan
 - a. Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat dan makanan
 - b. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
 - c. Peningkatan penyidikan dan penegakkan hukum di bidang obat dan makanan
 8. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
 - a. Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia
 9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
 - b. Penyuluhan masyarakat pola hidup Sehat
 10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - a. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
 - b. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin
 - c. Penanggulangan Kurang Energi Proteun KEP, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
 - d. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
 - e. Penanggulangan Gizi Lebih
 11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - a. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
 - b. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- a. Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk
- b. Pengadaan Alat - alat Fogging dan bahan-bahan foggin
- c. Pengadaan Vaksin Penyakit Menular
- d. Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
- e. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Peny. Menular
- f. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik
- g. Peningkatan Imunisasi
- h. Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan wabah
- i. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
- j. Penanggulangan Peny. Menular

13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (KW SPM)

- a. Penyusunan standar pelayanan Kesehatan
- b. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

14. Program pengadaan, peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas/Puskesmas pembantu dan Jaringannya

- a. Pembangunan Puskesmas (DAK)
- b. Pembangunan Puskesmas Pembantu (DAK)
- c. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas (DAK)
- d. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu
- e. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap
- f. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana Puskesmas
- g. Rehabilitasi sedang/ berat Puskesmas Pembantu (DAK)

15. Program peningkatan pelayanan Kesehatan lansia

- a. Pelayanan pemeliharaan kesehatan

16. Rumah Sakit Umum Daerah

- a. Program administrasi pelayanan perkantoran

- 1. Penyediaan jasa surat menyurat
- 2. Penyediaan alat tulis kantor
- 3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 7. Penyediaan peralatan rumah tangga
- 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- b. Penyediaan makanan dan minuman

- 1. Rapat-rapat organisasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2. Penyediaan jasa tenaga administrasi

- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur

- 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- 1. Peningkatan kesehatan masyarakat

- e. Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

- 1. Pengadaan CTSCANE

f. Program Pengembangan rumah sakit

1. Pembangunan ruang pemeriksaan penunjang rumah sakit

4.3.5. Evaluasi Pada RPJMD Tahun 2006-2010

Dalam melakukan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 atas dasar RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 dengan penekanan evaluasi dari bidang kesehatan juga dilihat dari dua aspek. Kedua aspek tersebut meliputi ; (1) aspek ketaatasasan atau konsistensi dan (2) aspek kontinuitas. Lebih jelasnya kajian dari dua aspek tersebut diuraikan seperti berikut ini.

4.3.5.1. Aspek Ketaatasasan atau Konsistensi

Sasaran pembangunan bidang kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 terdiri dari 4 sasaran. Sementara itu, dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 terdiri dari 6 sasaran. Bila diperhatikan dari aspek kuantitas, maka sasaran bidang kesehatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 tersebut lebih banyak dibandingkan dengan sasaran bidang kesehatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Kondisi tersebut merupakan suatu kewajaran secara hierarkhis karena RKPD merupakan turunan dari RPJMD. Hanya saja dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 pada sasaran bidang kesehatan tidak secara nyata mencantumkan sasaran yang berkaitan dengan meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial

bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta tersusunnya sistem perlindungan sosial. Tambahan kedua sasaran tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa dilihat dari aspek sasaran bidang kesehatan ternyata RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006 – 2010. Oleh karena itu terjadi ketaatasasan atau konsistensi.

Dilihat dari aspek program pembangunan bidang kesehatan yang tertuang dalam RPJMD 2006-2010 terdiri dari 3 program sebagaimana tersebut di atas dan program bidang kesehatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 terdiri dari 12 program, dan penjabaran tersebut masih dalam koridor ketaatasasan atau tidak menyimpang dari esistensi dasar dari RPJMD.

Sementara itu, dari 12 program kesehatan yang tercantum RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008, telah dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan bidang kesehatan sebanyak 49 kegiatan sebagaimana telah dirumuskan dalam matrik kegiatan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008. Selanjutnya memperhatikan antara program dengan kegiatan, ternyata telah memiliki kesesuaian atau konsistensi. Artinya dari 12 program bidang kesehatan telah menjadi dasar pijakan dalam penyusunan kegiatan, sehingga program telah menjiwai dan meliputi seluruh kegiatan yang disajikan dalam matrik kegiatan bidang kesehatan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008.

4.3.5.2. Aspek Kontinuitas

Sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 di bidang kesehatan, dibandingkan dengan sasaran bidang kesehatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008, ternyata telah memiliki hubungan dan relevansi yang signifikan. Kendatipun dalam RKPD 2008 telah terjadi pengembangan sasaran, yang mana dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 terdapat 4 sasaran dan dalam RKPD terdapat 6 sasaran, namun tetap dalam batas-batas keberlanjutan.

Secara implisit dan eksplisit sasaran bidang kesehatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran bidang kesehatan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010.

Begitu pula dilihat dari aspek program bahwa RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 sebagai turunan dari RPJMD 2006-2010, ternyata menunjukkan bahwa program-program di bidang kesehatan pada RKPD 2008 merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dengan program-program kesehatan sebagaimana yang termuat dalam RPJMD 2006-2010. Hal itu menandakan bahwa telah terjadi kontinuitas atau keberlanjutan baik secara hierarkhis maupun secara yuridis antara RPJMD dengan RKPD.

Begitu pula bila memperhatikan seluruh kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam matrik RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008, ternyata secara komprehensif telah sejalan

dengan program bidang kesehatan pada RPKD Kabupaten Jembrana tahun 2008. Atau secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan bidang kesehatan yang telah dirumuskan dalam matrik RPKD 2008 telah merupakan turunan dari program bidang kesehatan pada RPKD 2008. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa sasaran, program dan matrik kegiatan pada RPKD 2008 telah memenuhi aspek kontinuitas.

4.4. Bidang Daya Beli

Daya beli masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kesejahteraan. Artinya, semakin rendah tingkat daya beli masyarakat, maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang baik, akan berpengaruh terhadap tingkat intensitas sosial, baik itu masalah sosial maupun penyakit sosial

Begitu pula sebaliknya, jika tingkat kesejahteraan masyarakat baik, maka cenderung masalah sosial dan penyakit sosial relatif kecil tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Suatu daerah dengan tingkat kesejahteraan penduduknya rendah, tentu IPM daerah tersebut rendah pula.

Penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah, di samping membawa implikasi terhadap IPM, juga menjadi beban bagi suatu daerah dalam pembangunan. Namun, bila IPM suatu daerah dengan tinggi, maka dapat menjadi pendorong pembangunan dalam segala bidang, termasuk pembangunan ekonomi dan lain-lain.

Mengacu pada uraian tersebut di atas, maka kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan daya beli masyarakat berlandaskan pada kejelasan dalam strategi pembangunan. Salah satu bentuk dari strategi pembangunan tersebut adalah dengan menyusun RPJMD. Untuk melihat apakah RPJMD tersebut telah dapat berjalan sebagaimana direncanakan, maka dilanjutkan dengan menuangkan dalam bentuk RKPD.

Selanjutnya dalam mengevaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2010, terutama di bidang daya beli akan dibandingkan dengan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2008. Dalam membandingkan antara RPJMD dengan RKPD tersebut akan dilihat dari dua aspek, yakni sasaran dan program. Lebih jelasnya kedua aspek tersebut diuraikan seperti berikut ini.

4.4.1. Sasaran Pada RPJMD Tahun 2006-2010

Pada RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2010 terdapat 5 sasaran yang ingin dicapai dalam kaitan dengan peningkatan daya beli masyarakat Jembrana. Kelima sasaran tersebut diuraikan seperti berikut ini.

1. Terjaganya kemantapan ketersediaan beras dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan sawah.
2. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

3. Difersifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam dengan gizi berimbang untuk menurunkan ketergantungan pada beras.
4. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian
5. Meningkatnya produksi perdagangan hasil pertanian

Selanjutnya sasaran dalam bidang peningkatan daya beli masyarakat pada RKPD 2008 Kabupaten Jembrana telah diformulasikan sebanyak 7 (Tujuh) sasaran. Lebih jelasnya seperti berikut ini.

1. Terjaganya kemantapan dan ketersediaan beras dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan sawah yang menghasilkan produksi beras pada tahun 2006 sebanyak 24.029 tons dan prediksi tahun 2007 menjadi 35.522 tons, sedangkan proyeksi tahun 2008 menjadi menjadi 37.298 tons.
2. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif yang mana pada tahun 2006 ditetapkan 3 komoditas unggulan dan prediksi tahun 2007 menjadi 4 komoditas unggulan sedangkan proyeksi tahun 2008 tetap 4 komoditas unggulan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pokmas, lembaga usaha dan perkreditan Desa dari 2.050 kelompok tahun 2006 dan diprediksi berkembang pada tahun 2007 menjadi 2.350 kelompok sedangkan proyeksi tahun 2008 sebanyak 2.700 kelompok.

4. Meningkatnya unit usaha dari 5.871 pada tahun 2006 dan diprediksi tahun 2007 menjadi 7.398 unit usaha sedangkan proyeksi tahun 2008 menjadi 7.907 unit usaha.
5. Berkembangnya investasi dari Rp 42.591.570.000,00 tahun 2006 dan diprediksi menjadi Rp 44.721.148.500,00 pada tahun 2007, sedangkan proyeksi tahun 2008 menjadi Rp 46.957.205.925,00
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sebanyak 12.795 orang pada tahun 2006 dan prediksi tahun 2007 menjadi 15.993 orang, sedangkan proyeksi tahun 2008 sebanyak 19.839 orang.
7. Meningkatnya realisasi ekspor Kabupaten Jembrana dari Rp 57.759.121.995,00 tahun 2006 dan diprediksi sebesar Rp 58.336.713.216,00 pada tahun 2007, sedangkan proyeksi tahun 2008 sebesar Rp 85.920.080.340,00.

4.4.2. Program Daya Beli Pada RPJMD Tahun 2006-2010.

Dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2010 telah dirumuskan 4 (empat) program pembangunan bidang peningkatan daya beli di Kabupaten Jembrana. Keempat program tersebut adalah seperti berikut ini.

1. Peningkatan mutu dan jumlah produk pertanian
2. Program peningkatan penghasilan (pendapatan)
3. Program proteksi pertanian
4. Pembinaan KK miskin khususnya petani dan nelayan kecil (PNK).

4.4.3. Program Daya Beli Pada RKPD Tahun 2008.

Pada RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2008 telah pula dirumuskan program pembangunan peningkatan daya beli masyarakat. Dalam RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2008 terdapat tiga fokus kegiatan yakni program bidang pertanian, program bidang perindagkop dan program bidang tenaga kerja yang telah tersusun seperti berikut ini.

1. Program dibidang pertanian
 - a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - f. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
 - g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - h. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - i. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
 - j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
 - k. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - l. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
 - m. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 - n. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
 - o. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

- p. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
- q. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- r. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- s. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

2. Program dibidang Perindagkop

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kopetitif Usaha Kecil menengah
- b. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- c. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- e. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
- g. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
- h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa
- i. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- j. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- k. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa
- l. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- m. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- n. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

3. Program dibidang tenaga kerja
 - a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

4.4.4. Kegiatan Peningkatan Daya Beli Pada RKPD Tahun 2008

Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2008 merupakan penjabaran dari program yang telah tertuang pada RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2008. Adapun kegiatan-kegiatan bidang peningkatan daya beli tersebut seperti berikut ini.

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani terdiri dari
 - a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
 - b. Peningkatan kemampuan lembaga petani
 - c. Peningkatan sistem intensifikasi dan desintifikasi bagi petani/kelompok tani
 - d. PEDANA XXII kontak tani nelayan (KTNA)
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - a. Penyusunan data base potensi produksi pangan
 - b. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
 - c. Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
 - d. Pemantauan dan analisa harga pasar pangan pokok
 - e. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

- f. Koordinasi kebijakan perberasan.
 - g. Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian pedesaan
 - h. Peningkatan produksi produktivitas mutu produk perkebunan, produk pertanian
 - i. Penyuluhan sumber pangan alternatif
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
- a. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan
 - b. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana produksi hasil pertanian / perkebunan
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- a. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- a. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan, pemeliharaan kebun percobaan dragon fruit
 - b. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
 - c. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
 - d. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi pertanian

6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
 - ❖ Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
 - b. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - a. Pembibitan dan perawatan ternak
 - b. Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
 - c. Pengembangan agribisnis peternakan
 - d. Pengolahan lahan dan air (PLA)
 - e. Pendataan potensi peternakan di kab. Jembrana
 - f. Penataan ternak pemerintah
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana peningkatan hasil produksi ternak (kandang ayam ras petelor)
 - h. Pengembangan pembibitan sapi bali
9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
 - b. Promosi/pemasaran hasil produksi peternakan
 - c. Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
 - d. Penyuluhan kualitas dan teknik kemasan produk peternakan
 - e. Pengolahan informasi permintaan pasar kemasan atas hasil produksi peternakan

10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
 - a. Pengadaan sarana prasarana teknologi tepat guna
 - b. Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
 - c. Pelatihan pengoperasian teknologi tepat guna
11. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - a. Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
 - a. Operasi terpadu penanggulangan keamanan hutan bali barat
 - b. Peningkatan sarana prasarana pemantauan keamanan hutan
 - c. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
13. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 - * Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
14. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
 - * Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
15. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
 - * Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
16. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
 - * Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

17. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - a. Pengembangan bibit ikan unggul
 - b. Pendampingan pada kelompok tani pembudidayaan ikan
 - c. Pembinaan dan pengembangan perikanan
18. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - a. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
 - c. Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
19. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
 - * Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
20. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menengah
 - a. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah
 - b. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
21. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - a. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah
 - b. Penyelenggaraan pembinaan industri RT Industri kecil dan menengah
 - c. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah

22. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - a. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
 - b. Pembinaan, pengewasan dan penghargaan koperasi berprestasi
23. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
24. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 - a. Pasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil menengah di pedesaan
 - b. Fasilitasi kemitraan swasta dan UKM di pedesaan
 - c. Pembentukan percontohan badan usaha milik desa
25. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - a. Pembinaan kelompok masyarakat desa
 - b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
 - c. Pemberian stimulan pembangunan desa
26. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
 - * Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
27. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa
 - * Orientasi perancangan dan penyusunan perdes
28. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - * Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

29. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - * Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
30. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa
 - * Pembangunan promosi perdagangan internasional
31. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - a. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
 - b. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
 - c. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
 - d. Pengembangan potensi unggulan daerah
32. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - a. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
 - b. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur
 - c. Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
33. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - a. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya
 - b. Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan kluster industri
 - c. Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang IKM
 - d. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
34. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - a. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

- b. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
35. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan.
- a. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
 - b. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
 - c. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
 - d. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenaga kerjaan.
36. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- * Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

4.4.5. Evaluasi RPJMD Pada 2006-2010 Atas Dasar RKPD 2008

Dalam melakukan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 atas dasar RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 dengan penekanan evaluasi dari bidang peningkatan daya beli juga dilihat dari dua aspek. Kedua aspek tersebut meliputi ; (1) aspek ketaatasasan atau konsistensi dan (2) aspek kontinuitas. Lebih jelasnya kajian dari dua aspek tersebut diuraikan seperti berikut ini.

4.4.5.1. Aspek Ketaatasasan atau Konsistensi

Sasaran pembangunan peningkatan daya beli masyarakat dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2010 terdiri dari 5 sasaran.

Sementara itu, dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 terdiri dari 7 sasaran. Bila diperhatikan dari banyaknya sasaran, maka sasaran bidang peningkatan daya beli dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 tersebut lebih banyak dibandingkan dengan sasaran bidang peningkatan daya beli yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010.

Namun dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 tidak secara eksplisit mencantumkan sasaran yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi yang berhubungan dengan perindagkop dan ketenagakerjaan. Sementara itu peningkatan daya beli masyarakat sangat erat hubungannya dengan bidang perindagkop dan ketenagakerjaan disamping bidang pertanian.

Kondisi seperti tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa dilihat dari aspek sasaran bidang peningkatan daya beli, ternyata RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 telah lebih dikembangkan, tetapi dilihat dari aspek spirit sepenuhnya masih berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 baik yang berkaitan dengan bidang pertanian, perindagkop dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, aspek ketaatan tetap menjadi dasar pertimbangan pada penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 yang berhubungan dengan peningkatan daya beli masyarakat.

Memperhatikan aspek program pembangunan bidang peningkatan daya beli yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 terdiri dari 4 program sebagaimana tersebut di atas dan program

bidang peningkatan daya beli yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jember tahun 2008 terdiri dari 36 program, maka dapat dinyatakan bahwa secara kuantitatif program bidang peningkatan daya beli yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Jember Tahun 2008 telah melampaui program bidang peningkatan daya beli pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2006-2010. Hal itu menunjukkan secara yuridis telah memenuhi asas kepatutan karena secara hirarkhis RPJMD memiliki kedudukan lebih tinggi dari RKPD.

Sementara itu, dari 36 program peningkatan daya beli yang tercantum pada RKPD Kabupaten Jember tahun 2008, telah dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan bidang peningkatan daya beli sebanyak 93 kegiatan sebagaimana telah dirumuskan dalam matrik kegiatan pada RKPD Kabupaten Jember tahun 2008. Selanjutnya memperhatikan antara program dengan kegiatan, ternyata telah memiliki kesesuaian atau konsistensi. Artinya dari 36 program bidang peningkatan daya beli telah menjadi dasar pijakan dalam penyusunan kegiatan, sehingga program telah menjiwai dan meliputi seluruh kegiatan yang disajikan dalam matrik kegiatan bidang peningkatan daya beli pada RKPD Kabupaten Jember tahun 2008.

4.4.5.2. Aspek Kontinuitas

Sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010 di bidang peningkatan daya beli, dibandingkan dengan sasaran bidang peningkatan daya beli yang teruang dalam RKPD

Kabupaten Jembrana tahun 2008, ternyata telah memiliki hubungan dan relevansi yang signifikan.

Kendatipun dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 telah terjadi pengembangan sasaran, yang mana dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 terdapat 5 sasaran dan dalam RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2008 terdapat 7 sasaran. Secara implisit dan eksplisit sasaran bidang peningkatan daya beli dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran bidang peningkatan daya beli pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010

Begitu pula dilihat dari aspek program bahwa RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 sebagai turunan dari RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010, ternyata menunjukkan bahwa program-program di bidang peningkatan daya beli pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dengan program-program peningkatan daya beli sebagaimana yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010.

Kondisi tersebut di atas, menandakan bahwa telah terjadi kontinuitas atau keberlanjutan baik secara hirarkhis maupun secara yuridis antara RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dengan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 di bidang peningkatan daya beli.

Selanjutnya memperhatikan seluruh kegiatan di bidang peningkatan daya beli sebagaimana tercantum dalam matrik RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008, ternyata secara komprehensif telah

sejalan dengan program bidang peningkatan daya beli pada RPKD Kabupaten Jembrana tahun 2008. Atau secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan bidang peningkatan daya beli yang telah dirumuskan dalam matrik RPKD Kabupaten Jembrana tahun 2008 telah merupakan turunan dari program bidang peningkatan daya beli pada RPKD Kabupaten Jembrana tahun 2008.

4.5. Epilog

Berdasarkan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 atas dasar RPKD Kabupaten Jembrana tahun 2008, ternyata secara umum RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah menjiwai, meliputi dan telah dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam menyusun RPKD Kabupaten Jembrana tahun 2008. Hanya secara spesifik terdapat sasaran pada RPKD Kabupaten Jembrana tahun 2008 seolah-olah terkesan tidak taat asas dengan RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010. Kendatipun secara langsung maupun tidak langsung, tidak menimbulkan implikasi negatif dalam pelaksanaan pembangunan.

Begitu pula dengan program-program yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010, telah menjadi dasar pijakan dan acuan pokok dalam menyusun program-program pada RPKD Kabupaten Jembrana tahun 2008. Sehingga seluruh program pada RPKD Kabupaten Jembrana tahun 2008 telah memenuhi asas konsistensi dan kontinuitas. Selanjutnya ditinjau dari aspek hubungan

atau keterkaitan antara program-program dalam RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2008 dengan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam matrik pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008, ternyata telah pula mengikuti asas kepatutan dan ketaatan.

BAB V
POKOK-POKOK PIKIRAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2009
Perspektif Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli

5.1. Prolog

Secara nyata telah disusun di Kabupaten Jembrana RKPD tahun 2006, 2007 dan 2008. Di lihat dari aspek hierarkhis penyusunan RKPD selama periode 3 tahun tersebut, berdasarkan atas rumusan RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab di atas, implimentasi RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dapat diwujudkan dalam bentuk rumusan RKPD tahunan. RKPD yang telah dirumuskan di Kabupaten Jembrana adalah RKPD tahun 2006, RKPD tahun 2007 dan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 dan telah pula dievaluasi dari dua aspek, yakni aspek ketaatasasan atau konsistensi dan aspek kontinuitas atau keberlanjutan. Hasil evaluasi telah pula diuraikan seperti pada bab terdahulu/di atas.

Selanjutnya pada bab ini akan disajikan tentang kajian terhadap pokok-pokok pikiran untuk dipertimbangkan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009. Sudah tentu dalam penyusunan RKPD tersebut, RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 tetap menjadi dasar atau pedoman. Pokok-pokok pikiran ini hanya disajikan dari 3 (tiga) perspektif yakni : pendidikan, kesehatan dan daya beli. Selanjutnya sasaran, program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009 dirumuskan seperti berikut ini.

5.2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Dalam UUD 1945 pendidikan dinyatakan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Sebagai salah satu dasar kebutuhan manusia, maka peningkatan kualitas pendidikan bagi suatu daerah acapkali menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan pada daerah tersebut. Begitu pula halnya dengan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Jembrana. Berdasarkan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2008 pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk peningkatan kualitas fisik maupun nonfisik.

Sesungguhnya banyak faktor yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya semata-mata diukur dari output saja, tetapi keberhasilan dapat pula dilihat sejak dari input dan proses.

Di Kabupaten Jembrana indikator untuk mengukur keberhasilan di bidang pendidikan adalah angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM) dan angka drop out (DO), sedangkan untuk mengukur mutu pendidikan di Kabupaten Jembrana dilihat dari dua aspek, yakni hasil UAN dan UAS.

Sementara itu, sesungguhnya masih terdapat dua indikator yang dapat dipakai sebagai tambahan dalam mengukur keberhasilan mutu pendidikan, yakni (1) angka melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi

(AJPLT) dan (2) angka terserap bekerja (ATB), khususnya tamatan sekolah kejuruan.

Sehubungan dengan indikator-indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan seperti tersebut di atas, maka sasaran pokok, program pokok dan kegiatan pendidikan dalam RKPD Kabupaten Jember tahun 2009 diusulkan dengan rancangan seperti berikut ini.

5.2.1. Sasaran Pokok Pendidikan

Mengacu pada sasaran pokok pendidikan pada RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010 dan menimbang serta memperhatikan sasaran pokok pendidikan pada RKPD Kabupaten Jember tahun 2006, tahun 2007 dan tahun, maka pokok-pokok pikiran yang perlu dituangkan dalam sasaran pokok pendidikan pada RKPD Kabupaten Jember tahun 2009 adalah seperti berikut ini.

1. Meningkatnya anak terlayani pada pendidikan usia dini tahun 2009 sebesar 10% dibandingkan dengan jumlah anak usia dini terlayani tahun 2008.
2. Meningkatnya APS, APK-SD, APK-SMP dan APK-SMK/A tahun 2009 sebesar rata-rata 10% dibandingkan dengan tahun 2008.
3. menurunnya angka DO usia sekolah pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan tahun 2009 menjadi 0,01 %
4. Meningkatnya relevansi kelulusan dengan lapangan kerja tahun 2009 sebesar 10% dibandingkan dengan tahun 2008.

5. Meningkatnya proporsi penduduk mengikuti jenjang pendidikan dasar ke pendidikan menengah sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2008.
6. Meningkatnya proporsi penduduk mengikuti jenjang pendidikan menengah ke pendidikan tinggi sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2008.
7. Menurunnya angka ketidakkulusan siswa pada semua jenjang pendidikan yang mengikuti UAS dan UAN sebesar 100% dibandingkan dengan ketidakkulusan 2008
8. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dari pendidikan usia dini hingga ke perguruan tinggi, baik secara kuantitas maupun kualitas sebesar 25% dari tahun 2008.
9. Meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan sebesar minimal 100% dari tahun 2008.
10. Meningkatnya jumlah sekolah pada berbagai jenjang pendidikan yang terakreditasi sebesar minimal 100% dari tahun 2008.
11. Meningkatnya standar sekolah internasional (SBI) pada jenjang sekolah menengah sebesar minimal 100% dari tahun 2008.

5.2.2. Program Pokok Pendidikan

Program pokok pendidikan merupakan penjabaran dari sasaran pokok, sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009. Berdasarkan hasil kajian beberapa pokok-pokok pikiran yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pokok pendidikan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009 dapat disajikan seperti dibawah ini.

1. Program pendidikan anak usia dini
2. Program wajib belajar pendidikan 12 tahun
3. Program pendidikan menengah
4. Program pendidikan nonformal
5. Program peningkatan mutu siswa dan program penurunan angka ketidaklulusan siswa
6. Program peningkatan hubungan antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), termasuk instansi lainnya
7. Program peningkatan tenaga pendidik/guru
8. Program peningkatan tenaga administrasi sekolah
9. Program peningkatan jumlah siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi
10. Program peningkatan kualitas sarana dan prasarana perguruan tinggi di Kabupaten Jembrana.
11. Program peningkatan budaya baca masyarakat
12. Program peningkatan pembinaan tenaga kepastakaan
13. Program peningkatan kualitas sarana prasarana perpustakaan

14. Program peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan terhadap masyarakat.
15. Program peningkatan mutu atau status kelembagaan sekolah jenjang pendidikan menengah
16. Program pengadaan tenaga laboratorium untuk pendidikan

5.2.3. Kegiatan Pendidikan

Merumuskan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan didasarkan atas program-program pokok yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jember tahun 2009. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dari 16 program tersebut akan menjadi acuan dalam menjabarkan atau merumuskan beberapa kegiatan pendidikan. Adapun kegiatan-kegiatan pendidikan adalah seperti berikut ini.

1. Program pendidikan usia dini
 - a. Merhabilitasi gedung TK rusak, baik rusak ringan maupun berat
 - b. Mengkaji penambahan TK baru disesuaikan dengan pertumbuhan anak usia dini.
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan usia dini
 - d. Meningkatkan insentif guru usia dini
 - e. Mengarahkan dan mendorong masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya pada usia dini
2. Wajib belajar pendidikan 12 tahun
 - a. Penambahan ruang kelas, baik kualitas maupun kuantitas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

- b. Penambahan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dasar dan menengah (lingkungan sekolah, taman, kantin dan sejenisnya)
 - c. Merehabilitasi gedung sekolah jenjang dasar dan menengah, baik rusak ringan maupun berat
 - d. Penambahan sarana dan prasarana laboratorium pada jenjang pendidikan menengah.
 - e. Penambahan ruang perpustakaan beserta perlengkapan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
 - f. Mendorong masyarakat melalui pembinaan agar melanjutkan pendidikan putra-putrinya sampai jenjang menengah atas.
 - g. Meningkatkan dan melanjutkan pemberian subsidi pendidikan
 - h. Memperhatikan kebutuhan atau fasilitas siswa yang menjadi penyebab putus sekolah.
 - i. Memberikan subsidi kepada sekolah suasta dari tingkat dasar sampai menengah atas
 - j. Melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa berprestasi.
 - k. Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat siswa serta kreatifitas siswa dalam rangka meningkatkan keahlian hidup (*live skill*).
3. Program pendidikan menengah
- a. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penambahan jam belajar

- b. Memberikan subsidi kepada tenaga pendidik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
 - c. Memberikan insentif kepada tenaga pendidik yang berprestasi
 - d. Memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi
 - e. Memberikan penghargaan kepada pegawai administrasi yang berprestasi
 - f. Memberikan penghargaan kepada guru dan pegawai administrasi yang telah mengabdikan di atas 25 tahun
 - g. Menambah SMK sesuai dengan kebutuhan dan pasar.
 - h. Membantu biaya operasional bagi manajemen mutu
 - i. Melakukan pengkajian terhadap kurikulum
4. Program pendidikan nonformal
- a. Membantu masyarakat yang telah menyelenggarakan pendidikan nonformal, berupa sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan pemerintah
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam melakukan praktek lapangan atau magang
 - c. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berkeinginan mendirikan pendidikan nonformal yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
 - d. Mengembangkan pendidikan non formal khusus yang berkaitan dengan budaya Bali.
5. Program Peningkatan mutu siswa dan program penurunan angka ketidakkulusan siswa.

- a. Memberikan les atau pelajaran tambahan bagi siswa kelas 3 khususnya mata pelajaran UAS dan UAN semua jenjang pendidikan.
 - b. Memberikan insentif pada guru yang memberikan pelajaran tambahan dan berprestasi.
 - c. Melakukan *try out* untuk mata uji UAN dan UAS pada pada berbagai jenjang pendidikan.
 - d. Menambah buku-buku mata pelajaran terutama yang berhubungan dengan UAS dan UAN pada berbagai jenjang pendidikan.
 - e. Melakukan kerjasama dengan sekolah yang berkualitas baik ditingkat nasional maupun internasional
 - f. Melakukan studi banding ke sekolah-sekolah yang lebih berkualitas baik tingkat lokal ataupun nasional
 - g. Melakukan kunjungan ke sekolah yang lebih tinggi jenjangnya seperti siswa SMA ke perguruan tinggi terkenal baik lokal maupun nasional
6. Program peningkatan hubungan antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri.
- a. Memfasilitasi sekolah dalam melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, terutama bagi siswa, khususnya SMK.
 - b. Memberikan bantuan kepada siswa yang melakukan kerja praktek lapangan, khususnya di luar Kabupaten Jemberana.
 - c. Melakukan penyempurnaan kurikulum pada SMK melalui kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

- d. Memfasilitasi pengusaha (industri besar) agar supaya bersedia menjadi bapak angkat atau menyediakan prangkat praktek.
7. Program peningkatan tenaga pendidik atau guru.
- a. Menyelenggarakan diklat bagi guru-guru pada berbagai jenjang pendidikan dalam rangka peningkatan keahlian.
 - b. Memfasilitasi guru-guru yang melanjutkan pendidikan strata lebih tinggi.
 - c. Melakukan studi banding bagi guru-guru pada berbagai jenjang pendidikan baik ke dalam negeri maupun luar negeri.
 - d. Memfasilitasi dan mendorong guru untuk mengikuti lokakarya, seminar dan pertemuan ilmiah lainnya, baik regional, nasional maupun internasional
 - e. Memfasilitasi program pertukaran guru baik berskala nasional maupun internasional
8. Program peningkatan tenaga administrasi sekolah.
- a. Menyelenggarakan diklat bagi pegawai administrasi dalam rangka peningkatan keahlian.
 - b. Melakukan studi banding bagi tenaga administari, terutama ditingkat, regional dan nasional.
 - c. Memberikan subsidi bagi tenaga administrasi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
9. Program peningkatan jumlah siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

- a. Memberikan beasiswa kepada siswa yang mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.
 - b. Membantu masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan putra-putrinya dengan memberikan bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan.
 - c. Mendorong tamatan sekolah menengah atas agar mengutamakan melanjutkan ke perguruan tinggi lokal
10. Program peningkatan budaya baca masyarakat.
- a. Menambah ruang baca yang nyaman dan aman pada perpustakaan yang telah ada.
 - b. Menambah keragaman buku bacaan pada perpustakaan
 - c. Menambah sarana dan prasarana perpustakaan keliling
11. Program peningkatan pembinaan tenaga kepastakaan.
- a. Memberikan pendidikan spesialis kepastakawanan
 - b. Mendidik tenaga kepastakaan agar ramah teknologi
 - c. Melakukan studi banding ke perpustakaan yang berstandar.
12. Program peningkatan kualitas sarana prasarana perpustakaan.
- a. Membangun perpustakaan pada setiap kecamatan
 - b. Menambah perpustakaan keliling
 - c. Memperbaharui jumlah dan keragaman buku-buku di perpustakaan
13. Program peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan terhadap masyarakat.
- a. Mengembangkan Jaringan untuk program perpustakaan.
 - b. Menambah jumlah tenaga kepastakaan.

14. Program peningkatan mutu atau status kelembagaan pendidikan menengah
 - a. Memfasilitasi peningkatan status sekolah
 - b. Mengadakan workshop atau pelatihan berkaitan dengan akreditasi
 - c. Mendorong warga sekolah untuk melakukan karya-karya yang berkaitan peningkatan status
 - d. Mendorong warga sekolah untuk melakukan pengabdian masyarakat.
15. Program pengadaan tenaga laboratorium
 - a. Mengangkat tenaga laboratorium untuk tingkat SMP
 - b. Mengangkat tenaga laboratorium untuk tingkat SMA/SMK

5.3. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Sebagai salah satu dasar kebutuhan manusia, maka peningkatan kualitas kesehatan bagi masyarakat suatu daerah acapkali menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan pada daerah tersebut. Begitu pula halnya dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Jembrana. Berdasarkan RKPД Kabupaten Jembrana tahun 2006, 2007 dan 2008 pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk peningkatan kualitas fisik maupun nonfisik.

5.3.1. Sasaran Pokok Kesehatan

Memperhatikan sasaran kesehatan pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dan RKPD tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008, maka pokok-pokok pikiran yang perlu dituangkan dalam sasaran pokok kesehatan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009 adalah seperti berikut ini.

1. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat dibandingkan dengan pencapaian tahun 2008.
2. Menurunnya angka kematian bayi per 100.000 kelahiran di masyarakat menjadi sebesar 14,25 dari angka kematian bayi tahun 2008
3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi sebesar 50,875 per 100.000 kelahiran hidup dari angka kematian ibu tahun 2008
4. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita menjadi sebesar 4,50 % dari tahun 2008.
5. Meningkatnya ketrampilan tenaga pengobatan alternatif secara signifikan.
6. Meningkatnya kualitas dan kuanlitas sarana dan prasarana kesehatan dibandingkan dengan tahun 2008.
7. Meningkatnya kegiatan promosi kesehatan kepada masyarakat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2008

5.3.2. Program Pokok Kesehatan

Program pokok kesehatan merupakan penjabaran dari sasaran pokok yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009.

Berdasarkan hasil kajian beberap pokok-pokok pikiran yang terkait dengan penyusunan program pokok kesehatan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009 dapat disajikan seperti di bawah ini.

1. Program upaya kesehatan masyarakat
2. Program pengawasan obat dan makanan
3. Program pengembangan obat asli Indonesia
4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
5. Program perbaikan gizi masyarakat
6. Program pengembangan lingkungan sehat
7. Program pencegahan dan pananggulangan penyakit menular
8. Program standarisasi pelayanan kesehatan (KWSPM)
9. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
10. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
11. Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
12. Program peningkatan kualitas dukun beranak
13. Program peningkatan kualitas tukang pijat urat dan tulang

5.3.3. Kegiatan Kesehatan

Merumuskan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat didasarkan atas program-program yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009. Sebagaimana diuraikan

di atas, bahwa dari 15 program tersebut akan menjadi acuan dalam menjabarkan atau merumuskan kegiatan seperti berikut ini.

1. Program upaya kesehatan masyarakat

- a. Memberikan penyuluhan pada masyarakat.
- b. Memberikan imunisasi kepada balita
- c. Pengenalan tentang makanan tambahan pada balita
- d. Melanjutkan kegiatan safari kesehatan secara periodik ke masyarakat
- e. Penyuluhan kesehatan kepada ibu dan anak
- f. Melakukan kunjungan pengobatan langsung ke penduduk yang menderita penyakit “aneh”

2. Program pengawasan obat dan makanan

- a. Melakukan pemeriksaan secara reguler terhadap obat dan makanan di toko obat dan pasar
- b. Memperketat pengawasan peredaran obat yang terlarang.
- c. Melakukan pengawasan peredaran minuman keras
- d. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahan kimia yang berbahaya
- e. Memberikan penyuluhan kepada sentra-sentra industri dalam hal penggunaan zat-zat kimia.

3. Program pengembangan obat asli Indonesia

- a. Mendorong masyarakat menanam tanaman obat keluarga (TOGA)
- b. Memberikan penyuluhan tentang manfaat obat tradisional

- c. Memberikan dan mendorong masyarakat membudidayakan tanaman obat tradisional
 - d. Memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara proses pembuatan tanaman tradisional menjadi obat
 - e. Memberikan penyuluhan tentang tata cara pengawetan obat tradisional
4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- a. Melakukan penyuluhan tentang penanggulangan penyakit menular
 - b. Melakukan penyuluhan tentang pemberantasan nyamuk dan sejenisnya
 - c. Melakukan penyuluhan tentang hidup sehat
 - d. Melakukan penyuluhan tentang penyakit menular dan TBC.
 - e. Mencetak dan menyebarluaskan brosur-brosur tentang informasi kesehatan
 - f. Memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS
 - g. Memberikan penyuluhan tentang penggunaan alat-alat kontrasepsi
 - h. Memberikan penyuluhan tentang perkawinan usia dini
 - i. Memberikan penyuluhan tentang bahaya seks bebas dan penyakit kulit dan kelamin
 - j. Memberikan penyuluhan tentang akibat perokok pasif
5. Program perbaikan gizi masyarakat
- a. Memberikan penyuluhan tentang makanan bergizi
 - b. Memberikan penyuluhan pemanfaatan garam yodium
 - c. Memberikan penyuluhan tentang pemanfaatan ikan

- d. Memberikan penyuluhan tentang makanan berserat
 - e. Memberikan penyuluhan tentang makanan alternatif di luar beras.
 - f. Memberikan penyuluhan tentang makanan-makanan lokal yang memiliki gizi tinggi
 - g. Memberikan bantuan bibit unggul bergizi tinggi
 - h. Memberikan penyuluh tentang bahaya berat badan yang berlebihan
 - i. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang makanan-makanan yang bergizi tinggi
6. Program pengembangan lingkungan sehat
- a. Memberikan penyuluhan perbaikan saluran pembuangan limbah rumah tangga.
 - b. Memberikan bantuan fasilitas MCK bagi yang belum punya.
 - c. Penanaman pohon penghijauan yang bermanfaat.
 - d. Pembuatan taman-taman kota atau desa.
 - e. Pembuatan tong sampah
 - f. Pembuatan tempat pembuangan sampah akhir
7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- a. Memberikan penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyakit menular serta penanggulangannya.
 - b. Melakukan pemeriksaan penyakit menular secara berkala bagi masyarakat.
 - c. Melakukan penyemprotan pada tempat-tempat yang dianggap menjadi sumber penyakit menular.

- d. Memberikan perlindungan dan proteksi kepada pasien untuk mencegah penularan.
8. Program standarisasi pelayanan kesehatan (KWSPM)
 - a. Pengadaan pemerataan peralatan medis yang standar
 - b. Pemerataan penyebaran tenaga medis
 - c. Pemerataan penyebaran tenaga non medis
 9. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
 - a. Rehabilitasi gedung puskesmas/puskesmas pembantu.
 - b. Penambahan ruang perawatan dan ruang inap pada puskesmas
 - c. Penambahan peralatan medis dan para medis
 - d. Penambahan persediaan obat baik kualitas dan kuantitas.
 - e. Menambah keragaman jenis obat
 10. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.
 - a. Membuat tempat panti jompo yang representatif
 - b. Menghimbau kepada masyarakat tentang pentingnya panti jompo bagi masyarakat
 - c. Melakukan pemeriksaan umum pada lansia secara berkala.
 - d. Penyuluhan tentang makna hidup bagi lansia
 - e. Menyelenggarakan lomba ketrampilan dan kesenian bagi lansia
 - f. Mengadakan penyuluhan tentang penyakit lansia
 11. Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.
 - a. Rehabilitasi ruang pemeriksaan dan ruang inap yang rusak

- b. Penambahan ruang inap, baik di rumah sakit daerah maupun di Puskesmas.
 - c. Penambahan komputer untuk memperlancar pelayanan
 - d. Penambahan peralatan medis dan non medis.
 - e. Penambahan unit gedung baru untuk ruang inap
 - f. Menambah sarana prasarana yang belum tersedia dan dianggap penting untuk masyarakat
 - g. Menambah ruang untuk penunggu pasien yang refrensetatif sehingga tidak mengganggu pasien dan pemeriksaan
12. Program peningkatan kualitas dukun beranak
- a. Memberikan pelatihan kepada dukun beranak tentang tata cara melahirkan bayi
 - b. Memberikan fasilitas kepada dukun beranak
13. Program peningkatan kualitas tukang pijat urat dan tulang
- a. Memberikan pelatihan tentang pijat urat dan tulang.
 - b. Memberikan bantuan sarana prasarana kepada tukang pijat tulang dan urat.

5.4. Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Peningkatan daya beli masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan daya beli bagi masyarakat suatu daerah acapkali menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Begitu pula halnya dengan peningkatan daya beli masyarakat di Kabupaten Jembrana. Berdasarkan

RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, 2007 dan 2008 pelaksanaan pembangunan bidang peningkatan daya beli masyarakat diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup dan pengentasan kemiskinan.

5.4.1. Sasaran Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Memperhatikan sasaran pada RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dan RKPD 2006, 2007 dan 2008 Kabupaten Jembrana, maka pokok-pokok pikiran yang perlu dituangkan dalam sasaran pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009 adalah seperti berikut ini.

1. Terjaganya kemantapan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan sawah.
2. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang memiliki keunggulan kooperatif dan keunggulan kompetitif sebesar 50% dibandingkan tahun 2008.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pokmas, Lembaga usaha dan perkreditan desa sebesar 10% dibandingkan dengan tahun 2008.
4. Meningkatnya unit usaha sebesar 10% dibandingkan dengan tahun 2008.
5. Berkembangnya investasi sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2008.
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sebesar 8,15% dibandingkan dengan tahun 2008.

7. Meningkatnya realisasi ekspor Kabupaten Jembrana sebesar 2,57% dibandingkan dengan tahun 2008.
8. Meningkatnya produksi pertanian dalam arti luas sebesar 20% dari tahun 2008.
9. Meningkatnya kualitas hutan secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2008.
10. Terjaganya konservasi sumber daya alam untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
11. Meningkatnya pemanfaatan lahan kritis secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2008

5.4.2. Program Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Program peningkatan daya beli masyarakat merupakan penjabaran dari sasaran pokok yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009. Berdasarkan hasil kajian beberapa pokok-pokok pikiran yang terkait dengan penyusunan program pokok peningkatan daya beli masyarakat pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009 dapat disajikan seperti dibawah ini.

1. Program peningkatan kesejahteraan petani
2. Program peningkatan ketahanan pangan
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian atau perkebunan.
4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.
5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

6. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
7. Program peningkatan produksi hasil peternakan
8. Program peningkatan pemasaran hasil peternakan
9. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
10. Program rehabilitasi hutan dan lahan
11. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
12. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
13. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
14. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan
15. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut
16. Program pengembangan budidaya perikanan
17. Program pengembangan perikanan tangkap
18. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
19. Program peningkatan jumlah pokmas
20. Program peningkatan jumlah UKM
21. Program peningkatan kinerja koperasi dan LPD

5.4.3. Kegiatan Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Merumuskan kegiatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat didasarkan atas program-program yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009. Sebagaimana diuraikan di atas,

bahwa dari 20 program tersebut akan menjadi acuan dalam menjabarkan atau merumuskan kegiatan seperti berikut ini.

1. Program peningkatan kesejahteraan petani
 - a. Memberikan penyuluhan kepada petani tentang pemanfaatan waktu yang baik.
 - b. Memberikan penyuluhan tentang penggunaan alat-alat pertanian secara baik dan benar.
 - c. Memberikan penyuluhan tentang tata cara melakukan panen yang baik, benar dan tepat waktu
 - d. Memberikan penyuluhan kepada petani agar menghindarkan diri dari cengkraman tengkulak
2. Program peningkatan ketahanan pangan.
 - a. Memberikan bantuan bibit unggul kepada petani
 - b. Memberikan bantuan alat-alat pemberantas hama penyakit.
 - c. Memberikan bantuan subsidi pupuk pada petani
 - d. Memberikan insentif kepada petani
 - e. Memberikan penyuluhan tentang pengaturan pola tanam
 - f. Melakukan pertanian dengan sistem tumpang sari.
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan.
 - a. Membantu kelancaran distribusi barang-barang pertanian.
 - b. Menghidupkan pasar-pasar tradisional dan pasar desa.
 - c. Melakukan penyuluhan tentang peluang pasar dan pasar potensial.

4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan.
 - a. Memberikan penyuluhan tentang manfaat dan arti pentingnya teknologi dalam pertanian.
 - b. Memberikan bantuan alat-alat produksi pertanian kepada petani agar lebih maju dan produktif.
 - c. Menganjurkan kepada petani agar memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - d. Memberikan penyuluhan tentang optimalisasi pemanfaatan alat-alat pertanian
5. Program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
 - a. Penyuluhan tentang cara-cara sistem panen yang baik.
 - b. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian.
 - c. Memanfaatkan bibit unggul yang tahan penyakit.
 - d. Menggunakan pupuk organik
6. Program pemberdayaan penyuluh pertanian dan perkebunan lapangan
 - a. Meningkatkan keahlian tenaga penyuluh dalam berbagai bidang.
 - b. Menambah tenaga penyuluh pertanian.
 - c. Memberikan fasilitas atau alat-alat yang dibutuhkan oleh tenaga penyuluh
7. Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - a. Penyuluhan tentang cara-cara memilih bibit unggul dan tahan penyakit.

- b. Melakukan penyuluhan tentang tata cara pemeliharaan ternak yang baik.
 - c. Memberikan bantuan pengobatan ternak.
8. Program peningkatan pemasaran hasil peternakan
- a. Membuka pasar hewan di tiap-tiap kecamatan.
 - b. Memfasilitasi distribusi ternak keluar maupun masuk di Kab Jembrana.
 - c. Membangun jaringan dengan pabrik-pabrik pengolah daging di Bali maupun luar Bali.
 - d. Membuka terobosan pasar-pasar baru
 - e. Program kegiatan promosi hasil peternakan.
9. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
- a. Melakukan program kawin suntik
 - b. Mengolah pakan ternak dengan menggunakan teknologi.
 - c. Melakukan vaksinasi hewan.
10. Program rehabilitasi hutan dan lahan
- a. Penanaman pohon pada hutan yang kritis dan gundul.
 - b. Penanaman pohon pada lahan yang kritis dan kering .
 - c. Pengawasan dan pencegahan terhadap penebangan hutan secara liar.
11. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
- a. Mencegah pembakaran hutan.
 - b. Mencegah pencurian kayu di hutan
 - c. Mencegah perambahan hutan

12. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
 - a. Pengembangan hutan sebagai objek wisata.
 - b. Pengembangan hutan sebagai hutan produktif
 - c. Pengembangan hutan sebagai suaka margasatwa
13. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
 - a. Membantu sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi masyarakat pesisir.
 - b. Memberikan penyuluhan tentang penggunaan teknologi dalam mengoptimalkan hasil tangkapan.
 - c. Menggunakan teknologi dalam rangka mengolah hasil tangkapan.
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana pada tempat lelang ikan yang memadai
14. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan.
 - a. Memberikan penyuluhan agar masyarakat tidak menggunakan cara-cara ilegal dalam menangkap ikan.
 - b. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan laut dan trumbu karang.
 - c. Memberikan penyuluhan agar tidak mengambil pasir, karang dan batu di laut tanpa ijin.
15. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut.
 - a. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemeliharaan sumber daya laut.

- b. Memberikan penyuluhan tentang penyalahgunaan laut sebagai transportasi yang ilegal/penyelundupan.
 - c. Memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran.
16. Program pengembangan budi daya perikanan.
- a. Memberikan penyuluhan tentang pemeliharaan ikan di darat.
 - b. Membantu pemberian bibit unggul.
 - c. Sosialisasi tentang teknologi budidaya perikanan.
 - d. Memberikan bantuan peralatan dalam pengembangan budi daya perikanan.
17. Program pengembangan perikanan tangkap.
- a. Memberikan penyuluhan tentang tata cara pengawetan ikan tangkap
 - b. Memberikan penyuluhan tentang tata cara pengalengan ikan tangkap.
18. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
- a. Memberikan penyuluhan tentang perluasan potensi kawasan budi daya ikan laut.
 - b. Memberikan penyuluhan tentang perluasan potensi kawasan budi daya ikan payau
 - c. Memberikan penyuluhan tentang perluasan potensi kawasan budi daya ikan air tawar

19. Program peningkatan jumlah pokmas

- a. Memberikan penyuluhan tentang manfaat pokmas.
- b. Memberikan penyuluhan tentang tatacara memperoleh dan memanfaatkan bantuan.
- c. Memberikan bantuan modal dan sejenisnya.
- d. Memberikan pelatihan manajemen dan pelatihan teknis.

20. Program peningkatan jumlah UKM

- a. Mempermudah proses memperoleh izin.
- b. Memberikan pelatihan manajemen dan teknis.
- c. Memberikan bantuan modal usaha.
- d. Memfasilitasi pemasaran hasil produksi.

21. Program peningkatan kinerja koperasi dan LPD

- a. Memberikan pelatihan tentang manajemen dan teknis.
- b. Membantu modal usaha
- c. Membantu memperluas jaringan pasar.
- d. Membantu dan memfasilitasi pembentukan jaringan atau kemitraan.
- e. Membantu pelatihan peningkatan kualitas SDM.

5.5. Epilog

Rancangan penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009 dari tiga perspektif yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli telah dirukuskan sedemikian rupa seperti tersebut di atas. Namun rumusan tersebut baru sebatas perencanaan dan tentu membutuhkan

penyempurnaan apabila dikemudian hari ditetapkan menjadi RKPD Kabupaten Jember tahun 2009.

Hasil kajian pokok-pokok pikiran tersebut di atas, hanyalah sebuah pertimbangan atau bahan yang dapat dipakai sebagai acuan atau pembandingan di dalam menyempurnakan perumusan RKPD di masa yang akan datang. Semoga hasil kajian yang telah dituangkan dalam bab ini dapat menjadi inspirasi dan memberikan makna yang lebih bermanfaat dalam pembangunan di Kabupaten Jember, khususnya di bidang pembangunan pendidikan, kesehatan dan daya beli.

BAB VI
POKOK-POKOK PIKIRAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2010
Perspektif Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli

6.1. Prolog

Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan pembangunan tidak berbeda dengan daerah lain. Dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah diawali dengan menyusun RPJMD. Dari RPJMD tersebut diturunkan menjadi rancangan pembangunan tahunan yang disebut dengan RKPD. Pada periode 2006-2010 telah disusun RPJM Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dan dari RPJMD tersebut telah pula disusun RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, 2007 dan 2008.

RKPD tahun 2006, RKPD tahun 2007 dan RKPD tahun 2008 telah pula dievaluasi dari dua aspek, yakni aspek ketaatan atau konsistensi dan aspek kontinuitas atau keberlanjutan. Hasil evaluasi telah pula diuraikan seperti pada bab II, III dan IV di atas.

Khusus pada bab ini akan disajikan tentang kajian terhadap pokok-pokok pikiran untuk dipertimbangkan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2010. Pokok-pokok pikiran yang disajikan dalam kajian ini tetap berpedoman pada RPJMD tahun 2006-2010. Dan perlu disampaikan bahwa pokok-pokok pikiran ini hanya disajikan dari 3 perspektif yakni; pendidikan, kesehatan daya beli.

Penyajian usulan pokok-pokok pikiran dalam RKPD 2010 dari ketiga perspektif itupun dibatasi dalam tiga aspek, yakni; (1) aspek

sasaran, (2) aspek program dan (3) aspek kegiatan. Lebih jelasnya disajikan seperti berikut ini.

6.2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan dapat diukur pula dari keberhasilan bangsa tersebut mengelola dan melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Di Indonesia keberhasilan pembangunan juga dapat dilihat dari pembangunan pendidikan. Dalam UUD 1945 pendidikan dinyatakan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.

Sebagai salah satu dasar kebutuhan manusia, maka peningkatan kualitas pendidikan bagi suatu daerah acapkali menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan pada daerah tersebut. Begitu pula halnya dengan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Jember. Berdasarkan RKPD tahun 2006-2008 pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk peningkatan kualitas fisik maupun nonfisik. Sesungguhnya banyak faktor yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya semata-mata diukur dari output saja, tetapi keberhasilan dapat pula dilihat sejak dari input dan proses.

Di Kabupaten Jember indikator untuk mengukur keberhasilan di bidang pendidikan adalah angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM) dan angka drop

out (DO), sedangkan untuk mengukur mutu pendidikan di Kabupaten Jember dilihat dari dua aspek, yakni hasil UAN dan UAS. Sementara itu, sesungguhnya masih terdapat dua indikator yang dapat dipakai sebagai tambahan dalam mengukur keberhasilan mutu pendidikan, yakni (1) angka melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi (AJPLT) dan (2) angka terserap bekerja (ATB), khususnya tamatan sekolah kejuruan.

Memperhatikan indikator-indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan seperti tersebut di atas, maka diusulkan beberapa sasaran pokok, program pokok dan kegiatan pendidikan dalam RKPD Kabupaten Jember tahun 2010 seperti berikut ini.

6.2.1. Sasaran Pokok Pendidikan

Berdasarkan pada sasaran pokok pendidikan pada RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010 dan menimbang serta memperhatikan sasaran pokok pendidikan pada RKPD tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 di Kabupaten Jember, maka pokok-pokok pikiran yang perlu dituangkan dalam sasaran pokok pendidikan pada RKPD tahun 2010 di Kabupaten Jember adalah seperti berikut ini.

1. Meningkatnya anak terlayani pada pendidikan usia dini tahun 2010 sebesar 10% dibandingkan dengan jumlah anak usia dini terlayani tahun 2009.
2. Meningkatnya APS, APK SD, SMP dan SMK/A tahun 2010 sebesar rata-rata 10% dibandingkan dengan tahun 2009.

3. Tidak adanya anak usia sekolah pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan yang DO tahun 2010
4. Meningkatnya relevansi kelulusan dengan lapangan kerja tahun 2010 sebesar 10% dibandingkan dengan tahun 2009.
5. Meningkatnya proporsi penduduk mengikuti jenjang pendidikan dasar ke pendidikan menengah sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2009.
6. Meningkatnya proporsi penduduk mengikuti jenjang pendidikan menengah ke pendidikan tinggi sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2009.
7. Menurunnya angka ketidakkelulusan siswa pada semua jenjang pendidikan yang mengikuti UAS dan UAN 100% dibandingkan dengan ketidakkelulusan 2009.
8. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dari pendidikan usia dini hingga ke perguruan tinggi sebesar 25% dari tahun 2009.
9. Meningkatnya status perguruan tinggi yang ada di Jember tahun 2010 lebih tinggi dari tahun 2009.
10. Meningkatnya jumlah sekolah pada berbagai jenjang yang terakreditasi sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2009
11. Meningkatnya standar sekolah internasional di jenjang pendidikan menengah sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2009
12. Meningkatnya jumlah guru yang bersertifikasi sebesar 100% dari tahun 2009

6.2.2. Program Pokok Pendidikan

Program pokok pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan sasaran pendidikan. Oleh karena program pokok pendidikan merupakan penjabaran dari sasaran pokok pendidikan. Berdasarkan hasil kajian beberapa pokok-pokok pikiran yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pokok pendidikan pada RKPD tahun 2010 dapat disajikan seperti dibawah ini.

1. Program pendidikan anak usia dini
2. Program wajib belajar pendidikan 12 tahun
3. Program pendidikan menengah
4. Program pendidikan nonformal
5. Program peningkatan mutu siswa dan program penurunan angka ketidaklulusan siswa
6. Program peningkatan hubungan antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), termasuk instansi lainnya
7. Program peningkatan jumlah siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi
8. Program peningkatan kualitas sarana dan prasarana perguruan tinggi di Kabupaten Jemberana.
9. Program peningkatan budaya baca masyarakat
10. Program peningkatan pembinaan tenaga kepastakaan
11. Program peningkatan kualitas sarana prasarana perpustakaan
12. Program peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan terhadap masyarakat.

13. Program peningkatan mutu atau status kelembagaan sekolah jenjang pendidikan menengah
14. Program peningkatan status perguruan tinggi menjadi universitas atau sejenisnya
15. Program pengadaan tenaga laboratorium sekolah

6.2.3. Kegiatan Pendidikan

Setelah menjabarkan sasaran menjadi program-program pendidikan, maka dilanjutkan dengan menjabarkan program-program pendidikan menjadi kegiatan-kegiatan. Merumuskan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan didasarkan atas semangat atau spirit yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2006-2010. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dari 16 program tersebut akan menjadi acuan dalam menjabarkan atau merumuskan beberapa kegiatan pendidikan. Adapun kegiatan-kegiatan pendidikan adalah seperti berikut ini.

1. Program pendidikan usia dini
 - a. Merehabilitasi gedung TK rusak, baik rusak ringan maupun berat
 - b. Mengkaji penambahan TK baru disesuaikan dengan pertumbuhan anak usia dini.
 - c. Menambah atau membentuk kelompok bermain usia dini
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan usia dini
 - e. Meningkatkan insentif guru usia dini
 - f. Mengajak anak-anak usia dini belajar mengenal lingkungan

- g. Mengarahkan dan mendorong masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya pada usia dini

2. Wajib belajar pendidikan 12 tahun

- a. Penambahan ruang kelas, baik kualitas maupun kuantitas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
- b. Penambahan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dasar dan menengah (lingkungan sekolah, taman, kantin dan sejenisnya)
- c. Merehabilitasi gedung sekolah jenjang dasar dan menengah, baik rusak ringan maupun berat
- d. Penambahan sarana dan prasarana laboratorium pada jenjang pendidikan menengah.
- e. Penambahan ruang perpustakaan beserta perlengkapannya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
- f. Mendorong masyarakat melalui pembinaan agar melanjutkan pendidikan putra-putrinya sampai jenjang menengah atas.
- g. Meningkatkan dan melanjutkan pemberian subsidi pendidikan
- h. Memperhatikan kebutuhan atau fasilitas siswa yang menjadi penyebab putus sekolah.
- i. Memberikan subsidi kepada sekolah swasta dari tingkat dasar sampai menengah atas
- j. Melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa berprestasi.

- k. Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat siswa serta kreatifitas siswa dalam rangka meningkatkan keahlian hidup (*live skill*).

3. Program pendidikan menengah

- a. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penambahan jam belajar
- b. Memberikan subsidi kepada tenaga pendidik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Memberikan insentif kepada tenaga pendidik yang berprestasi
- d. Memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi
- e. Memberikan penghargaan kepada pegawai administrasi yang berprestasi
- f. Memberikan penghargaan kepada guru dan pegawai administrasi yang telah mengabdikan di atas 25 tahun
- g. Menambah SMK sesuai dengan kebutuhan dan pasar.
- h. Membantu biaya operasional bagi manajemen mutu
- i. Melakukan pengkajian terhadap kurikulum terutama muatan lokal sesuai dengan kebutuhan pasar
- j. Mengajak siswa menengah untuk lebih mengenal lingkungan melalui berbagai kunjungan di luar sekolah termasuk ke pemerintah

4. Program pendidikan nonformal

- a. Membantu masyarakat yang telah menyelenggarakan pendidikan nonformal, berupa sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan pemerintah
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam melakukan praktek lapangan atau magang
- c. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berkeinginan mendirikan pendidikan nonformal yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
- d. Mengembangkan pendidikan non formal khusus yang berkaitan dengan budaya Bali.

5. Program Peningkatan mutu siswa dan program penurunan angka ketidakkulusan siswa.

- a. Memberikan les atau pelajaran tambahan bagi siswa kelas 3 khususnya mata pelajaran UAS dan UAN semua jenjang pendidikan.
- b. Memberikan insentif pada guru yang memberikan pelajaran tambahan dan berprestasi.
- c. Melakukan *try out* untuk mata uji UAN dan UAS pada pada berbagai jenjang pendidikan.
- d. Menambah buku-buku mata pelajaran terutama yang berhubungan dengan UAS dan UAN pada berbagai jenjang pendidikan.
- e. Melakukan kerjasama dengan sekolah yang berkualitas baik ditingkat nasional maupun internasional

- f. Melakukan studi banding ke sekolah-sekolah yang lebih berkualitas baik tingkat lokal ataupun nasional
 - g. Melakukan kunjungan ke sekolah yang lebih tinggi jenjangnya seperti siswa SMA ke perguruan tinggi terkenal baik lokal maupun nasional
 - h. Melakukan kegiatan pengenalan lingkungan dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan
6. Program peningkatan hubungan antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri.
- a. Memfasilitasi sekolah dalam melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, terutama bagi siswa, khususnya SMK.
 - b. Memberikan bantuan kepada siswa yang melakukan kerja praktek lapangan, khususnya di luar Kabupaten Jember.
 - c. Melakukan penyempurnaan kurikulum pada SMK melalui kerjasama dengan dunia usaha dan industri.
 - d. Memfasilitasi pengusaha (industri besar) agar supaya bersedia menjadi bapak angkat atau menyediakan prangkat praktek.
7. Program peningkatan jumlah siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- a. Memberikan beasiswa kepada siswa yang mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.
 - b. Membantu masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan putra-putrinya dengan memberikan bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan.

- c. Mendorong tamatan sekolah menengah atas agar mengutamakan melanjutkan ke perguruan tinggi lokal
 - d. Mengundang atau mengajak pihak swasta untuk peduli terhadap pendidikan dan dapat memberikan beasiswa untuk siswa yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi
8. Program peningkatan kualitas sarana dan prasarana perguruan tinggi di Kabupaten Jembrana.
- a. Membantu STIKNA, baik perangkat lunak maupun keras
 - b. Membantu STIKES, baik perangkat keras maupun perangkat lunak.
 - c. Mengusahakan untuk memberikan bantuan tenaga pengajar pada perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jembrana
9. Program peningkatan budaya baca masyarakat.
- a. Menambah ruang baca yang nyaman dan aman pada perpustakaan yang telah ada.
 - b. Menambah keragaman buku bacaan pada perpustakaan
 - c. Menambah sarana dan prasarana perpustakaan keliling
10. Program peningkatan pembinaan tenaga kependidikan.
- a. Memberikan pendidikan spesialis kependidikan
 - b. Mendidik tenaga kependidikan agar ramah teknologi
 - c. Melakukan studi banding ke perpustakaan yang berstandar.
11. Program peningkatan kualitas sarana prasarana perpustakaan.
- a. Membangun perpustakaan pada setiap kecamatan
 - b. Menambah perpustakaan keliling

- c. Memperbaharui jumlah dan keragaman buku-buku dipergustakaan
12. Program peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan terhadap masyarakat.
- a. Mengembangkan Jinet untuk program perpustakaan.
 - b. Menambah jumlah tenaga kepustakaan.
 - c. Menambah sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan
 - d. Menambah pengadaan sarana perpustakaan yang berkaitan dengan media elektronik seperti CD Room
 - e. Menambah keragaman bahan bacaan
13. Program peningkatan mutu atau status kelembagaan pendidikan menengah
- a. Memfasilitasi peningkatan status sekolah
 - b. Mengadakan workshop atau pelatihan berkaitan dengan akreditasi
 - c. Mendorong warga sekolah untuk melakukan karya-karya yang berkaitan peningkatan status
 - d. Mendorong warga sekolah untuk melakukan pengabdian masyarakat.
 - e. Menyelenggarakan lomba karya ilmiah baik di tingkat regional maupun nasional
14. Program peningkatan mutu atau status kelembagaan pendidikan tinggi

- a. Memfasilitasi pengurusan ijin operasional bagi perguruan tinggi yang belum memiliki ijin operasional
 - b. Memfasilitasi peningkatan akreditasi bagi perguruan tinggi yang belum memiliki akreditasi
 - c. Mendorong civitas akademika perguruan tinggi untuk melakukan tri dharma perguruan tinggi
 - d. Memberi insentif dosen untuk melakukan penelitian atau membuat karya ilmiah
 - e. Memberi insentif dosen dan mahasiswa untuk melakukan pengabdian pada masyarakat
 - f. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan lokakarya, seminar dan sejenisnya
 - g. Merintis kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta yang berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas
 - h. Memfasilitasi bagi tenaga dosen yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi
 - i. Melakukan tirtayatra dalam rangka membangun moral siswa dibidang keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa
15. Program pengadaan tenaga laboratorium sekolah
- a. Mengangkat tenaga laboratorium di tingkat SMP
 - b. Mengangkat tenaga laboratorium di tingkat SMA/SMK

6.3. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Memperkokoh modal dasar pembangunan suatu bangsa dapat dilakukan dengan membangun kesehatan masyarakat atau penduduk. Oleh karena kesehatan di samping sebagai modal dasar, juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.

Sebagai salah satu dasar kebutuhan manusia, maka peningkatan kualitas kesehatan bagi masyarakat suatu daerah acapkali menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan pada daerah tersebut. Begitu pula halnya dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan RKPD tahun 2006, 2007 dan 2008 pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk peningkatan kualitas fisik maupun nonfisik. Dan untuk lebih meningkatkan atau memantapkan pembangunan di bidang kesehatan tersebut dibutuhkan keberlanjutan atau kontinuiti. Keberlanjutan pembangunan kesehatan seperti di Kabupaten Jembrana ini dapat dilakukan dengan melanjutkan penyusunan program pembangunan tahunan, seperti penyusunan RKPD 2010. Kendatipun tahun 2010 masih 2 tahun lagi, namun tidak salah jika disajikan lebih awal pokok-pokok pikiran yang dapat dipergunakan sebagai bahan dan dasar pertimbangan dalam menyusun RKPD 2010 sehingga akan menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna.

6.3.1. Sasaran Pokok Kesehatan

Merumuskan sasaran pokok kesehatan di Kabupaten Jembrana dalam RKPD 2010 tidak bisa dipisahkan dengan sasaran kesehatan pada RPJMD tahun 2006-2010 dan RKPD tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 Kabupaten Jembrana. Hasil kajian menunjukkan beberapa pokok-pokok pikiran yang perlu dituangkan dalam sasaran pokok kesehatan pada RKPD tahun 2010 adalah seperti berikut ini.

1. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat dibandingkan dengan pencapaian tahun 2009.
2. Menurunnya angka kematian bayi per 100.000 kelahiran di masyarakat menjadi sebesar 14 dari angka kematian bayi tahun 2009
3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi sebesar 50 per 100.000 kelahiran hidup dari angka kematian ibu tahun 2009
4. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita menjadi sebesar 3,50% dari tahun 2009.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebesar 10% dari tahun 2009.
6. Tersusunnya sistem perlindungan sosial yang semakin baik, dibandingkan dengan tahun 2009.
7. Meningkatnya tenaga medis dan para medis sebesar 25% dibandingkan dengan tahun 2009.
8. Meningkatnya ketrampilan tenaga pengobatan alternatif secara signifikan.

9. Meningkatnya kualitas dan kuanlitas sarana dan prasarana kesehatan dibandingkan dengan tahun 2009.
- 10.Meningkatnya kegiatan promosi kesehatan kepada masyarakat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2009

6.3.2. Program Pokok Kesehatan

Sasaran pokok pendidikan memiliki hubungan sinergis dengan program pokok pendidikan. Hubungan yang sinergis itu menyebabkan esensi antara sasaran dan program tidak boleh bertentangan. Program pokok kesehatan pada RKPD tahun 2010 merupakan penjabaran dari sasaran pokok yang tertuang dalam RKPD tahun 2010.

Berdasarkan hasil kajian beberapa pokok-pokok pikiran perlu dituangkan dalam RKPD tahun 2010 di Kabupaten Jembrana. Adapun pokok-pokok pikiran yang terkait dengan penyusunan program pokok kesehatan pada RKPD tahun 2010 dapat disajikan seperti dibawah ini.

1. Program upaya kesehatan masyarakat
2. Program pengawasan obat dan makanan
3. Program pengembangan obat asli Indonesia
4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
5. Program perbaikan gizi masyarakat
6. Program pengembangan lingkungan sehat
7. Program pencegahan dan pananggulangan penyakit menular
8. Program standarisasi pelayanan kesehatan (KWSPM)

9. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
10. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
11. Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
12. Program peningkatan kualitas dukun beranak
13. Program peningkatan kualitas tukang pijat urat dan tulang

6.3.3. Kegiatan Kesehatan

Penyusunan kegiatan kesehatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2010 didasarkan atas program kesehatan pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2010 sebagaimana telah dituangkan di atas. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dari 15 program tersebut akan menjadi acuan dalam menjabarkan atau merumuskan kegiatan-kegiatan bidang pendidikan seperti berikut ini.

1. Program upaya kesehatan masyarakat
 - a. Memberikan penyuluhan pada masyarakat.
 - b. Memberikan imunisasi kepada balita
 - c. Memberikan fasilitas posyandu
 - d. Pengenalan tentang makanan tambahan pada balita
 - e. Melanjutkan kegiatan safari kesehatan secara periodik ke masyarakat
 - f. Penyuluhan kesehatan kepada ibu dan anak

- g. Melakukan kunjungan pengobatan langsung ke penduduk yang menderita penyakit “aneh”
 - h. Penyuluhan makanan dan minuman yang kadaluwarsa
2. Program pengawasan obat dan makanan
- a. Melakukan pemeriksaan secara reguler terhadap obat dan makanan yang kadaluwarsa di toko obat dan pasar
 - b. Memperketat pengawasan peredaran obat yang terlarang.
 - c. Melakukan pengawasan peredaran minuman keras
 - d. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahan kimia yang berbahaya
 - e. Memberikan penyuluhan kepada sentra-sentra industri dalam hal penggunaan zat-zat kimia.
3. Program pengembangan obat asli Indonesia
- a. Memberikan penyuluhan tentang manfaat tanaman obat keluarga (TOGA)
 - b. Mendorong masyarakat menanam tanaman obat keluarga (TOGA)
 - c. Memberikan penyuluhan tentang manfaat obat tradisional
 - d. Memberikan dan mendorong masyarakat membudidayakan tanaman obat tradisional
 - e. Memberikan bantuan bibit tanaman obat tradisional
 - f. Memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara proses pembuatan obat dari tanaman tradisional
 - g. Memberikan penyuluhan tentang tata cara pengawetan obat tradisional

4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
 - a. Melakukan penyuluhan tentang penanggulangan penyakit menular
 - b. Melakukan penyuluhan tentang pemberantasan nyamuk dan sejenisnya
 - c. Melakukan penyuluhan tentang hidup sehat
 - d. Melakukan penyuluhan tentang penyakit menular dan TBC.
 - e. Mencetak dan menyebarkan brosur-brosur tentang informasi kesehatan
 - f. Memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS
 - g. Memberikan penyuluhan tentang penggunaan alat-alat kontrasepsi
 - h. Memberikan penyuluhan tentang bahaya perkawinan usia dini
 - i. Memberikan penyuluhan tentang bahaya seks bebas dan penyakit kulit dan kelamin
 - j. Memberikan penyuluhan tentang akibat perokok pasif
5. Program perbaikan gizi masyarakat
 - a. Memberikan penyuluhan tentang makanan bergizi
 - b. Memberikan penyuluhan pemanfaatan garam yodium
 - c. Memberikan penyuluhan tentang pemanfaatan ikan
 - d. Memberikan penyuluhan tentang makanan berserat
 - e. Memberikan penyuluhan tentang makanan alternatif di luar beras.
 - f. Memberikan penyuluhan tentang makanan-makanan lokal yang memiliki gizi tinggi
 - g. Memberikan penyuluhan tentang bahaya berat badan yang berlebihan

- h. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang makanan-makanan yang bergizi tinggi
6. Program pengembangan lingkungan sehat
- a. Memberikan penyuluhan perbaikan saluran pembuangan limbah rumah tangga.
 - b. Memberikan bantuan fasilitas MCK bagi yang belum punya.
 - c. Penanaman pohon penghijauan yang bermanfaat.
 - d. Pembuatan taman-taman kota atau desa.
 - e. Pembuatan tong sampah
 - f. Pembuatan tempat pembuangan sampah akhir
 - g. Memberikan penyuluhan tentang sampah organik dengan anorganik
 - h. Pembuatan got atau saluran air dari rumah tangga ke pembuangan air
7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- a. Memberikan penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyakit menular serta penanggulangannya.
 - b. Melakukan pemeriksaan penyakit menular secara berkala bagi masyarakat.
 - c. Melakukan penyemprotan pada tempat-tempat yang dianggap menjadi sumber penyakit menular.
 - d. Memberikan perlindungan dan proteksi kepada pasien untuk mencegah penularan.

8. Program standarisasi pelayanan kesehatan (KWSPM)
 - a. Pengadaan pemerataan peralatan medis yang standar
 - b. Pemerataan penyebaran tenaga medis
 - c. Pemerataan penyebaran tenaga non medis dibidang kesehatan
9. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
 - a. Rehabilitasi gedung puskesmas/puskesmas pembantu.
 - b. Penambahan ruang perawatan dan ruang inap pada puskesmas
 - c. Penambahan peralatan medis dan para medis
 - d. Penambahan persediaan obat baik kualitas dan kuantitas.
 - e. Menambah keragaman jenis obat
10. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.
 - a. Membuat tempat panti jompo yang representatif
 - b. Menghimbau kepada masyarakat tentang pentingnya panti jompo bagi masyarakat
 - c. Melakukan pemeriksaan umum pada lansia secara berkala.
 - d. Penyuluhan tentang makna hidup bagi lansia
 - e. Menyelenggarakan lomba ketrampilan dan kesenian bagi lansia
 - f. Mengadakan penyuluhan tentang penyakit lansia
11. Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.
 - a. Rehabilitasi ruang pemeriksaan dan ruang inap yang rusak
 - b. Penambahan ruang inap, baik di rumah sakit daerah maupun di Puskesmas.

- c. Penambahan komputer untuk memperlancar pelayanan
 - d. Penambahan peralatan medis dan non medis.
 - e. Penambahan unit gedung baru untuk ruang inap
 - f. Menambah sarana prasarana yang belum tersedia dan dianggap penting untuk masyarakat
 - g. Menambah ruang untuk penunggu pasien yang representatif sehingga tidak mengganggu pasien dan pemeriksaan
12. Program peningkatan kualitas dukun beranak
- a. Memberikan pelatihan kepada dukun beranak tentang tata cara melahirkan bayi
 - b. Memberikan fasilitas kepada dukun beranak
13. Program peningkatan kualitas tukang pijat urat dan tulang
- a. Memberikan pelatihan tentang pijat urat dan tulang.
 - b. Memberikan bantuan sarana prasarana kepada tukang pijat tulang dan urat.

6.4. Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Kemampuan daya beli masyarakat pada suatu daerah tidak dapat dipisahkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat bersangkutan. Daya beli masyarakat dapat pula dipakai sebagai tolak ukur untuk melihat tingkat dan tarap hidup. Sehingga peningkatan daya beli bagi masyarakat suatu daerah acapkali menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan.

Begitu pula halnya dengan peningkatan daya beli masyarakat di Kabupaten Jembrana. Berdasarkan RKPD tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 pelaksanaan pembangunan bidang peningkatan daya beli masyarakat diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup dan pengentasan kemiskinan serta untuk tahun 2010 tujuan itu rupanya masih dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam mengukur kesuksesan pembangunan di Kabupaten Jembrana.

6.4.1. Sasaran Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Memperhatikan sasaran pada RPJMD tahun 2006-2010 dan RKPD tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 Kabupaten Jembrana, maka pokok-pokok pikiran yang perlu dituangkan dalam sasaran pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2010 adalah seperti berikut ini.

1. Terjaganya kemantapan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan sawah.
2. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang memiliki keunggulan koperatif dan keunggulan kompetitif sebesar 50% dibandingkan tahun 2009.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pokmas, Lembaga usaha dan perkreditan desa sebesar 10% dibandingkan dengan tahun 2009.
4. Meningkatnya unit usaha sebesar 25% dibandingkan dengan tahun 2009.

5. Berkembangnya investasi sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2009.
6. Meningkatnya realisasi ekspor Kabupaten Jember sebesar 10% dibandingkan dengan tahun 2009.
7. Meningkatnya produksi pertanian dalam arti luas sebesar 20% dari tahun 2009.
8. Meningkatnya kualitas hutan secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2009.
9. Terjaganya konservasi sumber daya alam untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
10. Meningkatnya pemanfaatan lahan kritis secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2009

6.4.2. Program Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa sasaran dan program memiliki hubungan yang sinergis. Begitu pula dengan program peningkatan daya beli masyarakat merupakan penjabaran dari sasaran pokok yang tertuang dalam RKPD 2010.

Hasil kajian menunjukkan beberapa pokok-pokok pikiran yang dapat dimasukkan dalam penyusunan program dalam RKPD tahun 2010 terkait peningkatan daya beli masyarakat dapat disajikan seperti dibawah ini.

1. Program peningkatan kesejahteraan petani
2. Program peningkatan ketahanan pangan

3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.
4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.
5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
6. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
7. Program peningkatan produksi hasil peternakan
8. Program peningkatan pemasaran hasil peternakan
9. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
10. Program rehabilitasi hutan dan lahan
11. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
12. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
13. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
14. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan
15. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut
16. Program pengembangan budidaya perikanan
17. Program pengembangan perikanan tangkap
18. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
19. Program peningkatan jumlah Pokmas
20. Program peningkatan jumlah UKM
21. Program peningkatan kinerja koperasi dan LPD

6.4.3. Kegiatan Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Merumuskan kegiatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat didasarkan atas program-program yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2010. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dari 23 program tersebut akan menjadi acuan dalam menjabarkan atau merumuskan kegiatan seperti berikut ini.

1. Program peningkatan kesejahteraan petani
 - a. Memberikan penyuluhan kepada petani tentang pemanfaatan waktu yang baik (dewasa ayu/sasih/musim tanam).
 - b. Memberikan penyuluhan tentang penggunaan alat-alat pertanian secara baik dan benar.
 - c. Memberikan penyuluhan tentang tata cara melakukan panen yang baik, benar dan tepat waktu
 - d. Memberikan penyuluhan kepada petani agar menghindarkan diri dari cengkraman tengkulak
2. Program peningkatan ketahanan pangan.
 - a. Memberikan bantuan bibit unggul kepada petani
 - b. Memberikan bantuan alat-alat pemberantas hama penyakit.
 - c. Memberikan bantuan subsidi pupuk pada petani
 - d. Memberikan insentif kepada petani
 - e. Memberikan penyuluhan tentang pengaturan pola tanam
 - f. Melakukan pertanian dengan sistem tumpang sari.

3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan.
 - a. Membantu kelancaran distribusi barang-barang pertanian.
 - b. Menghidupkan pasar-pasar tradisional dan pasar desa.
 - c. Melakukan penyuluhan tentang peluang pasar dan pasar potensial.
 - d. Memnfaatkan KUD yang ada
4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan.
 - a. Memberikan penyuluhan tentang manfaat dan arti pentingnya teknologi dalam pertanian.
 - b. Memberikan bantuan alat-alat produksi pertanian kepada petani agar lebih maju dan produktif (misalnya traktor).
 - c. Mengajukan kepada petani agar memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - d. Memberikan penyuluhan tentang optimalisasi pemanfaatan alat-alat pertanian
5. Program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
 - a. Penyuluhan tentang cara-cara sistem tanam dan panen yang baik.
 - b. Melakukan intensifikasi lahan pertanian.
 - c. Memanfaatkan bibit unggul yang tahan penyakit.
 - d. Menggunakan pupuk organik dan anorganik
 - e. Membimbing tata cara pengolahan lahan yang baik
 - f. Penyuluhan tentang cara-cara memilih bibit unggul dan tahan penyakit.

- g. Pembangunan mesin-mesin untuk pengolahan hasil pertanian
6. Program pemberdayaan penyuluh pertanian dan perkebunan lapangan
- a. Meningkatkan keahlian tenaga penyuluh dalam berbagai bidang.
 - b. Menambah tenaga penyuluh pertanian.
 - c. Memberikan fasilitas atau alat-alat yang dibutuhkan oleh tenaga penyuluh
7. Program peningkatan produksi hasil peternakan
- a. Penyuluhan tentang cara-cara memilih bibit unggul dan tahan penyakit.
 - b. Melakukan penyuluhan tentang tata cara pemeliharaan ternak yang baik.
 - c. Memberikan bantuan pengobatan ternak.
 - d. Memberikan pelatihan tentang pakan ternak yang murah dan bergizi
8. Program peningkatan pemasaran hasil peternakan
- a. Membuka pasar hewan di tiap-tiap kecamatan.
 - b. Memfasilitasi distribusi ternak keluar maupun masuk di Kab Jembrana.
 - c. Membangun jaringan dengan pabrik-pabrik pengolah daging di Bali maupun luar Bali.
 - d. Membuka terobosan pasar-pasar baru
 - e. Program kegiatan promosi hasil peternakan.

9. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
 - a. Melakukan program kawin suntik
 - b. Mengolah pakan ternak dengan menggunakan teknologi.
 - c. Melakukan vaksinasi hewan.
 - d. Pembangunan mesin-mesin untuk pengolahan hasil peternakan
10. Program rehabilitasi hutan dan lahan
 - a. Penanaman pohon pada hutan yang kritis dan gundul.
 - b. Penanaman pohon pada lahan yang kritis dan kering .
 - c. Pengawasan dan pencegahan terhadap penebangan hutan secara liar.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap hutan secara kontinyu untuk menghindari terjadinya penyerobotan lahan hutan
11. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
 - a. Mencegah pembakaran hutan.
 - b. Mencegah pencurian kayu di hutan
 - c. Mencegah perambahan hutan
12. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
 - a. Pengembangan hutan sebagai objek wisata.
 - b. Pengembangan hutan sebagai hutan produktif
 - c. Pengembangan hutan sebagai suaka margasatwa
13. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
 - a. Membantu sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi masyarakat pesisir.

- b. Memberikan penyuluhan tentang penggunaan teknologi dalam mengoptimalkan hasil tangkapan.
 - c. Menggunakan teknologi dalam rangka mengolah hasil tangkapan.
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana pada tempat lelang ikan yang memadai
14. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan.
- a. Memberikan penyuluhan agar masyarakat tidak menggunakan cara-cara ilegal dalam menangkap ikan.
 - b. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan laut dan trumbu karang.
 - c. Memberikan penyuluhan agar tidak mengambil pasir, karang dan batu di laut tanpa ijin.
15. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut.
- a. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemeliharaan sumber daya laut.
 - b. Memberikan penyuluhan tentang penyalahgunaan laut sebagai transportasi yang ilegal/penyelundupan.
 - c. Memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran.
16. Program pengembangan budi daya perikanan.
- a. Memberikan penyuluhan tentang pemeliharaan ikan di darat.
 - b. Membantu pemberian bibit unggul.

- c. Sosialisasi tentang teknologi budidaya perikanan.
 - d. Memberikan bantuan peralatan dalam pengembangan budi daya perikanan.
17. Program pengembangan perikanan tangkap.
- a. Memberikan penyuluhan tentang tata cara pengawetan ikan tangkap
 - b. Memberikan penyuluhan tentang tata cara pengalengan ikan tangkap.
18. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
- a. Memberikan penyuluhan tentang perluasan potensi kawasan budi daya ikan laut.
 - b. Memberikan penyuluhan tentang perluasan potensi kawasan budi daya ikan payau
 - c. Memberikan penyuluhan tentang perluasan potensi kawasan budi daya ikan air tawar
19. Program peningkatan jumlah pokmas
- a. Memberikan penyuluhan tentang manfaat pokmas.
 - b. Memberikan penyuluhan tentang tatacara memperoleh dan memanfaatkan bantuan.
 - c. Memberikan bantuan modal dan sejenisnya.
 - d. Memberikan pelatihan manajemen dan pelatihan teknis.

20. Program peningkatan jumlah UKM

- a. Mempermudah proses memperoleh ijin dan memberikan penyuluhan tentang amdal.
- b. Memberikan pelatihan manajemen dan teknis.
- c. Memberikan bantuan modal usaha.
- d. Memfasilitasi pemasaran hasil produksi.
- e. Membantu jaringan kemitraan atau bapak angkat

21. Program peningkatan kinerja koperasi dan LPD

- a. Memberikan pelatihan tentang manajemen dan teknis.
- b. Membantu modal usaha
- c. Membantu memperluas jaringan pasar.
- d. Membantu dan memfasilitasi pembentukan jaringan atau kemitraan.
- e. Membantu pelatihan peningkatan kualitas SDM.

6. 5. Epilog

Menyajikan pokok-pokok pikiran yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dan dasar pertimbangan dalam merancang sesuatu tidak mudah. Banyak kendala yang dihadapi, baik waktu maupun keterbatasan kemampuan. Begitu pula dengan penyajian pokok-pokok pikiran dari suatu hasil evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 Kabupaten Jembrana dalam rangka menyajikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2010.

Pokok-pokok pikiran sebagai hasil kajian ini, hanya dilihat dari tiga perspektif yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli. Namun rumusan tersebut baru sebatas perencanaan dan tentu membutuhkan penyempurnaan apabila dikemudian hari ditetapkan menjadi RKPD Kabupaten Jember tahun 2010. Hasil kajian pokok-pokok pikiran tersebut di atas, hanyalah sebuah pertimbangan atau bahan yang dapat dipakai sebagai acuan atau pembanding di dalam menyempurnakan perumusan RKPD di masa yang akan datang.

Semoga hasil kajian yang telah dituangkan dalam bab ini dapat menjadi inspirasi dan memberikan makna yang lebih bermanfaat dalam pembangunan di Kabupaten Jember, khususnya di bidang pembangunan pendidikan, kesehatan dan daya beli di tahun 2010 dan seterusnya.

BAB VII PENUTUP

Setelah melakukan evaluasi dan kajian terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 maka selanjutnya dapat disajikan kesimpulan dan rekomendasi. Adapun kesimpulan dan rekomendasi tersebut disajikan seperti berikut ini :

7.1 Kesimpulan

Dalam mengevaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dipergunakan pedoman RKPD tahunan yang telah disusun. Adapun RKPD yang telah dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD adalah RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008. Sehubungan dengan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009 dan tahun 2010 belum dirumuskan maka dalam hal ini akan diberikan kajian berupa pokok-pokok pikiran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi pemerintah kabupaten Jembrana dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009 dan Kabupaten Jembrana tahun 2010 yang akan datang. Selanjutnya dapat disimpulkan beberapa hal seperti berikut ini :

1. Bahwa evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 hanya dievaluasi dari 3 perspektif yakni Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat.
2. Bahwa evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 dengan dasar RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 dan tahun

2007 serta tahun 2008 hanya dilihat dari 2 aspek yakni aspek sasaran dan aspek program.

3. Bahwa RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 ternyata setelah dievaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sehingga antara RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 dengan RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah memenuhi asas ketaatan dan asas kontinuitas.
4. Bahwa RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 sebagai penjabaran dari RPJMD tahun 2006-2010 ternyata setelah dievaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sehingga antara RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2007 dengan RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah memenuhi asas ketaatan dan asas kontinuitas.
5. Bahwa RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 ternyata setelah dievaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sehingga antara RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2008 dengan RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah memenuhi asas ketaatan dan asas kontinuitas.
6. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah dapat dirumuskan pokok-pokok pikiran untuk dipergunakan sebagai bahan dan acuan dalam merumuskan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009 yang akan datang.

7. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010 telah dapat dirumuskan pokok-pokok pikiran untuk dipergunakan sebagai bahan dan acuan dalam merumuskan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2010 yang akan datang.
8. Bahwa dalam matrik kegiatan dalam RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006 dan 2007 terdapat beberapa kegiatan yang tumpang tindih.

7.2 Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas selanjutnya dapat diajukan beberapa pokok-pokok pikiran dalam bentuk rekomendasi seperti berikut ini :

1. Bahwa untuk penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009 ketaat asasan atau konsistensi agar tetap diperhatikan sehingga substansi pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2009 tidak bertentangan dengan RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010.
2. Bahwa untuk penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2010 ketaat asasan atau konsistensi agar tetap diperhatikan sehingga substansi pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2010 tidak bertentangan dengan RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2006-2010.
3. Bahwa dalam menjabarkan program khususnya pada tiga bidang yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 menjadi matrik rencana kerja, masih terdapat beberapa kegiatan yang tumpang tindih. Sehingga dianjurkan agar dalam penyusunan tersebut dibutuhkan prinsip kehati-

hatian dan penelahaan secara lebih mendalam dan sistematis sehingga terhidar dari penyusunan kegiatan yang tumpang tindih tersebut.

4. Bahwa dalam rangka menyusun RPJMD dan RKPD tahun 2009 dan RKPD tahun 2010 dianjurkan selalu berpedoman pada aturan atau regulasi yang terbaru. Sehingga rencana pembangunan yang disusun tidak menyimpang dari kaedah-kaedah yang tertuang dalam regulasi tersebut.
5. Bahwa sehubungan dengan telah tercapainya program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Jembrana saat ini, maka dianjurkan agar target pendidikan ditingkatkan kejenjang yang lebih tinggi sehingga keberadaan Perguruan Tinggi di Kabupaten Jembrana perlu dipertimbangkan untuk dibantu baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras.
6. Apabila dipandang perlu hasil kajian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan atau rujukan dalam menyusun RKPD tahun 2009 dan RKPD tahun 2010 di Kabupaten Jembrana.